

**Pengembangan Sumber Daya Guru SD Dalam
Rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan**
(studi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana pada
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

Disusun Oleh :
TITIK SYARIFAH JAMIL
NIM : 0310313091



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
MALANG
2008



THANKS TO

Penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

Allah SWT karena limpahan rejeki dan karunianya maka skripsi ini dapat selesai

Bapak Prof.DR.Agus Suryono, MS selaku dosen pembimbing utama dan Endah Setyowati, S.Sos., Msi karena telah mengarahkan penulis dengan memberikan arahan serta pendapat dan saran di dalam proses pembuatan skripsi ini, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik seperti yang diharapkan.

Bapak Prof.DR.Suhadak M.Ec, selaku Dekan fakultas Ilmu administrasi Universitas Brawijaya.

Bapak Prof.Drs.Solichin AW,MA,Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi publik Universitas Brawijaya

Bapak DR. Imam Hanafi, MS, M.si, selaku sekretaris jurusan Fakultas Ilmu administrasi Publik.

Bapak Drs. Sulhiyono,MPd selaku Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi dan Ibu.Hj.Suhernik, MPd selaku Kepala Sekolah SDN 4 Penganjuran Rekan-rekan angkatan 2003 yang telah banyak memberikan bantuan di dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

Terima kasih penulis persembahkan kepada ibunda dan ayahanda tercinta atas dorongan dan doa yang tulus ikhlas mengiringi penulis selama menuntut ilmu.

Malang, 2008

Titik Syarifah jamil

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Penelitian ini diberi judul “ Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik” yang dilaksanakan pada Kantor Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.. Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar kesarjanaan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa nama dan pihak sebagai berikut:

1. Bapak DR. Suhadak, MEC selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
2. Bapak Drs.Trilaksono Nugroho,MS dan Drs.Aspan Munadi,MAP selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan menasehati penulis.
3. Bapak Nurjadi selaku Kepala Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu
4. Bapak M. Hantono.ST selaku Kepala Urusan Keuangan yang telah memberikan informasi dan kerjasamanya.
5. Bapak Mukadi selaku Kepala Urusan umum yang telah memberikan informasi dan bantuannya.
6. Bapak Samsul Hadi selaku Sekretaris desa yang telah memberikan informasi dan tuntutannya.
7. Ibu Retno selaku Staf yang telah memberikan informasi dan bantuannya.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini bermanfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan serta pihak-pihak yang membutuhkan.

Malang, 2007

Muhammad Sadat Hamzah

SUMMARY
THE DEVELOPMENT OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHER
RESOURCE TO IMPROVE EDUCATION QUALITY
(Study at Education Official, Banyuwangi Regency)
(Titik, Syarifah, Jamil, 2007)

Education was an aspect with its important position in the process of highly quality human resource development in a country. The different school environment (as an education channel) and students' demand in the process of learning, in addition to the very complex Indonesian geographic, often didn't come into complete appreciation to the decision maker in the central. Therefore, the process of education quality improvement really required teacher resource development in elementary school. The Education Official for Banyuwangi Regency organized the necessary activity for elementary school teacher resource development.

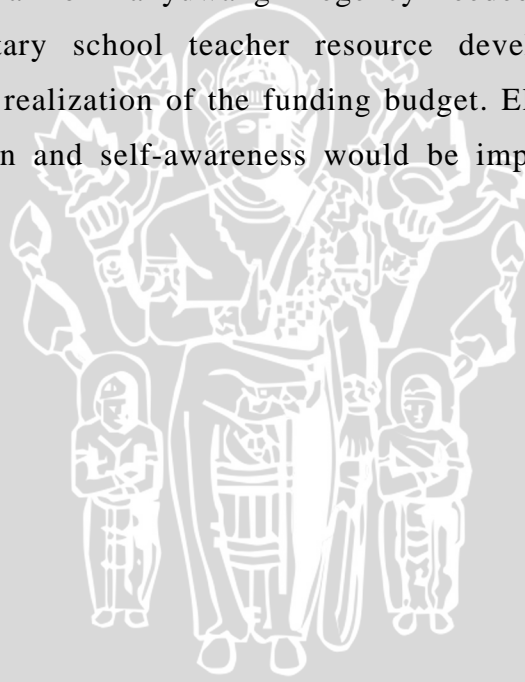
Related to this matter, research was aimed to produce a description about the implementation of elementary school teacher resource development under the effect of the Education Official for Banyuwangi Regency, and to examine the improvement of education quality.

In this research, descriptive research and qualitative approach came into consideration. The research was located at Banyuwangi Regency under the effect of the Education Official for Banyuwangi Regency. It considered several elementary schools in Banyuwangi Regency. Primary data were collected from the interview with some informants. Data collection technique involved unstructured interview, observation and documentation. Research instrument was the author and the supporting tools were interview manual and field note.

Results of research indicated that the Education Official for Banyuwangi Regency was managing the activity of teacher resource development to establish school cluster. The objective of establishing school cluster was standing as the facility of improving the elementary school teacher skill and strengthening the students' learning quality and

achievement. The activity had been conducted regularly through School Cluster and every Saturday in a week. The average achievement of School Final Test reflected the instability of education quality at Banyuwangi. The graduation rate of School Final Test showed a decrement pattern causing a depriving education quality. Barriers were challenging the education activity. Supporting factors, however, still became evident from the Education Official for Banyuwangi Regency and the interested parties.

Data presentation and the theories concluded that the activity seemed favorable despite the barriers existed. The achievement of School Final Test, in average, ensured annual fluctuation of the students but the graduation rate of School Final Test decreased intermittently. Therefore, the Education Official for Banyuwangi Regency needed to increase the activity of elementary school teacher resource development and to improve the routine realization of the funding budget. Elementary school teacher's cooperation and self-awareness would be important to pursue this objective.



RINGKASAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA GURU SEKOLAH DASAR DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN (Studi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi)

(Titik Syarifah Jamil, 2007)

Pendidikan merupakan suatu aspek yang menduduki posisi penting dalam proses pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi di dalam suatu negara. Namun beragamnya kondisi lingkungan sekolah (sebagai salah satu jalur pendidikan) dan bervariasinya kebutuhan siswa di dalam proses pembelajaran serta kondisi geografis Indonesia yang sangat kompleks, sering kali tidak dapat diapresiasi secara lengkap oleh pengambil keputusan di tingkat pusat. Oleh karena itu di dalam proses peningkatan kualitas pendidikan diperlukan pengembangan sumber daya guru Sekolah Dasar yang baik. Hal ini mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi untuk mengadakan kegiatan pengembangan sumber daya guru Sekolah Dasar.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan pengembangan Sumber daya guru SD Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dan mengetahui peningkatan kualitas pendidikan yang dapat dicapai.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di wilayah Kabupaten Banyuwangi sedangkan situsnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dan beberapa SD di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang bersangkutan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara tidak terstruktur, observasi dan dokumentasi. Sedangkan instrument penelitian adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat Bantu yakni pedoman wawancara dan catatan lapangan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan kegiatan pengembangan sumber daya guru dengan membentuk gugus sekolah. Tujuan pembentukan gugus sekolah adalah

sebagai fasilitas peningkatan kemampuan dan keterampilan Guru SD yang pada gilirannya akan memacu peningkatan kualitas dan hasil belajar siswa. Kegiatan ini dilakukan secara teratur melalui sistem Gugus Sekolah dan dilaksanakan setiap hari sabtu tiap minggunya. Dilihat dari nilai rata-rata Ujian Akhir Sekolah dapat diketahui bahwa adanya ketidakstabilan kualitas dunia pendidikan di Kabupaten Banyuwangi, selain itu dilihat dari tingkat kelulusan UAS terjadi penurunan prosentase kelulusan UAS SD yang mengakibatkan kualitas pendidikan kian menurun. Dalam pelaksanaan kegiatan ini ditemukan beberapa hambatan yang menjadi kendala kegiatan tersebut. Tetapi disisi lain ada faktor pendukung yang berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sendiri maupun pihak lain yang bersangkutan.

Berdasarkan penyajian data dan juga teori-teori yang ada dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik meskipun masih terdapat berbagai kendala yang ditemukan. Dilihat dari nilai rata-rata UAS siswa terjadi fluktuasi pada setiap tahunnya, dan dilihat dari tingkat kelulusan UAS terjadi penurunan secara berturut-turut. Oleh karena itu Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi perlu memperbanyak kegiatan pengembangan sumber daya guru SD dan menambah anggaran dana sehingga dapat lebih sering dan rutin dilaksanakan. Demi kelancaran yang dilakukan, kerja sama dan kesungguhan hati para guru SD sangat diharapkan agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai.

PEDOMAN WAWANCARA (INTER VIEW GUIDE)

A. Umum

1. Bagaimanakah deskripsi singkat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi ?
2. Bagaimanakah Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi ?
3. Bagaimanakah Struktur Kelembagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi ?
4. Jumlah dan persebaran lembaga Sekolah Dasar di Kabupaten Banyuwangi ?

B. Untuk Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

1. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi untuk mengembangkan Sumber Daya Guru Sekolah Dasar ?
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pengembangan Sumber Daya Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Banyuwangi ?
3. Menurut pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi bagaimana respon/partisipasi Guru dalam kegiatan ini ?
4. Kualitas pendidikan dapat diukur dari apa saja ?
5. Apakah dengan diselenggarakannya kegiatan Pengembangan Sumber Daya Guru Sekolah Dasar tersebut, kualitas pendidikan dapat meningkat ?
6. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam kegiatan Pengembangan Sumber Daya Guru Sekolah Dasar ?

C. Untuk Pihak Guru Sekolah Dasar

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Banyuwangi ?
2. Apa saja manfaat yang diperoleh Bapak/Ibu dari kegiatan ini ?
3. Bagaimana tingkat kehadiran Bapak/Ibu dalam kegiatan ini ?
4. Apakah dengan diadakannya kegiatan ini kualitas pendidikan bisa meningkat ?
5. Apa saja faktor penghambat dan pendukung kegiatan ini ?



**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA GURU SD
DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN
(Studi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi)**

oleh :

Titik Syarifah Jamil (0310313091)

Dosen Pembimbing :

1 Dr. Agus Suryono MS

2 Dra. Lely Mindarti, Msi

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 meliputi peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, masyarakat di daerah-daerah konflik, ataupun masyarakat penyandang cacat.

Dan saat ini negara Indonesia sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan. Pembangunan ini tentunya tidak berhenti setelah mencapai titik tertentu melainkan terus menerus atau berkesinambungan. Dalam melaksanakan pembangunan faktor SDM merupakan faktor utama. Setiap negara memerlukan SDM yang berkualitas, memiliki kemampuan untuk mengelola dan memajukan negaranya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Berbicara mengenai kualitas SDM tentu tidak terlepas dari unsur pendidikan. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas SDM oleh karena itu wajar bila “mencerdaskan kehidupan bangsa” menjadi salah satu tujuan negara seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea IV yang kemudian dijabarkan pada pasal 31 yakni :

- (1). Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
- (2). Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Dari pasal di atas dapat kita ketahui bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab besar menyelenggarakan suatu pengajaran nasional guna mewujudkan bangsa yang cerdas dan manusia yang berkualitas. Untuk itu kemudian dibuat satu undang-undang yang mengatur pelaksanaannya yakni undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan melalui tiga jalur yakni jalur pendidikan formal atau jalur pendidikan sekolah, dan jalur pendidikan non formal atau jalur pendidikan luar sekolah, dan jalur pendidikan informal atau jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Selanjutnya jalur pendidikan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah jalur pendidikan formal yaitu jalur pendidikan sekolah.

Pendidikan formal atau pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diperoleh seseorang di sekolah secara teratur, sistematis, bertingkat dan mengikuti syarat yang jelas dan ketat, mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi (Hasbullah, 2001 : 46). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan sekolah merupakan pendidikan berjenjang sesuai dengan tingkat usia anak didik dalam jangka waktu tertentu dan

mengikuti syarat-syarat tertentu. Jenjang pendidikan ini dibagi menjadi tiga yakni jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari proses pembelajaran di sekolah merupakan pendidikan yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan dasar adalah untuk memberikan bekal kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah (Depdiknas, 2003 : 14).

Sementara itu menurut Rianto (1995 : 25) tujuan pendidikan dasar adalah :

- a. Untuk meningkatkan (meninggikan) pendidikan dari tingkat sekolah dasar menjadi setaraf sekolah lanjutan tingkat pertama.
- b. Untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Dengan meningkatkan (meninggikan) tingkat pendidikan dasar diharapkan dapat mengangkat kualitas minimal manusia Indonesia sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.
- c. Untuk menyiapkan peserta didik dengan ketrampilan dasar umum maupun kejuruan sebagai bekal untuk tujuan kemasyarakatan yang dalam hal ini meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- d. Untuk merealisasikan amanat MPR melalui GBHN dalam meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia.

Dengan demikian pendidikan dasar di Indonesia dilaksanakan untuk mewujudkan bangsa yang cerdas melalui pembekalan pengetahuan dasar kepada peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.

Pendidikan dasar di Indonesia dilaksanakan selama 9 tahun sebagai program wajib belajar yang mencakup pendidikan di tingkat SD selama 6 tahun dan SLTP selama 3 tahun. Sekolah dasar sebagai bagian dari pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang memberikan pengetahuan kepada siswanya sebagai bekal menuju jenjang pendidikan lanjutan sehingga keberadaannya menjadi sangat penting dan harus senantiasa diperhatikan.

Dalam proses pembelajaran di sekolah pada umumnya terdapat berbagai komponen yang membentuk dan mempengaruhinya. Salah satu komponen tersebut adalah guru yang memegang peranan sangat penting karena kemampuan guru dalam memberikan pengajaran dan pendidikan akan mempengaruhi terhadap pengetahuan dan pembentukan kepribadian siswanya. Dalam pengembangan pendidikan, pelaksanaan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi pola hidup dan pola pikir manusia, oleh karena itu tenaga pendidik harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Dalam melaksanakan tugasnya, guru tidak saja bertanggung jawab terhadap aspek pengetahuan tetapi juga terhadap aspek mendidik kepribadian anak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa guru bertanggung jawab dalam mengajar ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) dan juga mendidik moral (*transfer of value*) yang mana seringkali diwujudkan dengan mendidik kepribadian, tanggung jawab, dan kemandirian anak sehingga ia berada dalam pengawasan guru atau berada dilingkungan sekolah. Maka dari itu sangat diharapkan keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab guru adalah tujuan untuk mencetak generasi bangsa yang unggul, yaitu manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani.

Guru yang tumbuh dan berkembang akan memperoleh suatu kemampuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan karena mereka dapat menciptakan pengajaran yang lebih dinamis dan sesuai dengan perkembangan jaman. Sumber daya guru merupakan pengembangan personal pendidikan karena sumber daya guru merupakan kunci pokok dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

Untuk mengupayakan pendidikan yang berkualitas maka diperlukan guru yang memiliki sumber daya yang berkualitas pula. Jadi, meningkatkan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang tidak terlepas dari proses pengembangan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, perbaikan kualitas pendidikan telah menjadi paradigma baru dalam pembangunan bangsa kita dengan cara pengembangan sumber daya gurunya.

Demikian pula pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, pengembangan sumber daya guru SD merupakan cara yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena SD merupakan lembaga pendidikan formal yang pertama kali harus ditempuh oleh masyarakat Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar”. (Depdiknas, 2003 : 24).

Guru ditingkat SD memiliki tugas yang tidak ringan karena sebagian besar guru SD di Indonesia adalah guru kelas. Seorang guru kelas dituntut untuk mampu menyampaikan berbagai bidang studi, padahal setiap bidang studi memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi materi, metode penyampaian maupun alat peraganya. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri bagi guru karena mereka harus mampu menguasai berbagai tehnik pelajaran sesuai dengan tuntutan bidang studi. Jadi, guru harus mempunyai kemampuan dan kesabarab dalam mendidik anak-anak tersebut. Dengan begitu, pengembangan sumber daya guru SD harus terus dilakukan.

Berpijak dari fenomena diatas, maka peneliti akan menelaah lebih jauh mengenai kegiatan apa yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi terkait dengan meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara pengembangan sumber daya guru SD di Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian sangatlah penting diadakan penelitian yang berjudul **“Pengembangan Sumber Daya Guru SD Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan”**(studi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, perumusan masalah sangat penting diperlukan untuk memberikan ketearahan dalam penelitian dan memfokuskan pada suatu permasalahan guna mencapai jawabannya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana implementasi kegiatan pengembangan SDM guru Sekolah Dasar di kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana peningkatan kualitas pendidikan yang telah dicapai terkait pelaksanaan pengembangan SDM guru Sekolah Dasar di Kabupaten Banyuwangi?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengembangan sumber daya guru Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi kegiatan pengembangan SDM guru Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui peningkatan kualitas pendidikan yang telah dicapai terkait pelaksanaan pengembangan SDM guru Sekolah Dasar di Kabupaten Banyuwangi.
3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengembangan sumber daya guru Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuwangi.

D. Kontribusi Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan sumbangan pemikiran bagi Kepala Sekolah dasar dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan SDM guru Sekolah Dasar.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi guru Sekolah Dasar dalam meningkatkan mutu pelajaran serta melancarkan belajar mengajar melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan SDM guru.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai upaya pengembangan keilmuan khususnya administrasi publik konsentrasi Sistem Pemerintahan Daerah.
 - b. Sebagai referensi bagi peneliti lanjutan tentang hal yang sama dengan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah dan Manajemen Sumber Daya Manusia, dalam Lingkup Administrasi Publik

1. Pemerintahan Daerah
2. Kepegawaian Daerah
3. Partisipasi Publik
4. Ruang Lingkup Administrasi Publik
5. Pendekatan-pendekatan di dalam Administrasi publik
6. Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai Kajian Administrasi Publik
7. Ruang Lingkup manajemen Sumber Daya manusia di dalam Organisasi

B. Pengembangan Sumber Daya Guru Sekolah Dasar (SD)

1. Pengembangan
2. Unsur Pengembangan
3. Unsur Motivasi
4. Sumber Daya Guru Sekolah Dasar
5. Bentuk Pengembangan Sumber Daya Guru SD

C. Kualitas Pendidikan

1. Pendidikan
2. Kualitas
3. Komponen yang Mempengaruhi Kualitas Pendidikan Dasar

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati

B. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Implementasi kegiatan Peningkatan pengembangan SDM guru Sekolah Dasar di Kabupaten Banyuwangi, yang dapat dilihat dari :
 - a. Kegiatan yang dilakukan secara teratur dalam gugus sekolah, meliputi :
 - Sekolah dasar Inti dan Sekolah dasar Imbas
 - Pusat Kegiatan Guru (PKG)
 - b. Kegiatan yang dilakukan secara temporer yang meliputi :
 - Penataran
 - Diklat
 - Seminar
2. Peningkatan kualitas pendidikan yang telah dicapai terkait pelaksanaan pengembangan SDM guru Sekolah Dasar di kabupaten Banyuwangi yang bisa dilihat dari :
 - a. Hasil dan manfaat adanya pengembangan sistem gugus sekolah yang dilakukan secara teratur terdiri dari
 - Sekolah Dasar Inti
 - Sekolah Dasar Imbas
 - Pusat Kegiatan Guru
 - b. Hasil dan manfaat adanya pengembangan SDM guru Sekolah Dasar yang dilakukan secara temporer melalui :
 - Penataran
 - Diklat
 - Seminar
3. Faktor pendukung dan penghambat Pengembangan Sumber Daya Guru Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian terhadap obyek yang akan diteliti, maka lokasi penelitian ini adalah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi.

Pengertian dari situs itu sendiri adalah menunjukkan di mana sebenarnya peneliti dapat menangkap keadaan dari obyek yang akan diteliti, sehingga data yang akurat dan diperlukan dapat diperoleh. Maka situs penelitian ini adalah pada Subdin Tenaga Kependidikan serta Subdin TK/SD dan salah satu SD sebagai sampel yang berkaitan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.

2. Data skunder

meliputi data atau dokumen yang terdapat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi berupa peraturan perundangan, catatan-catatan resmi, dokumen-dokumen, laporan-laporan yang ada, buku-buku ilmiah, hasil-hasil penelitian serta arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Dokumentasi

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Adapun yang menjadi instrumen penelitian dalam hal ini adalah peneliti sebagai instrumen utama dibantu dengan instrumen tambahan yaitu pedoman wawancara serta perangkat penunjang lainnya seperti alat pencatatan dan sebagainya.

G. Analisa Data

Setelah pekerjaan di lapangan dari suatu penelitian selesai, maka kegiatan berikutnya adalah mengadakan analisa data, sehingga nantinya dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah atau mendapat jawaban atas permasalahan tersebut. Analisa data menurut Patton seperti yang dikutip Moleong (2002 : 103) adalah.

“proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar”.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Penelitian ini diberi judul “Pengembangan sumber daya Guru SD dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.” yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar kesarjanaan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa nama dan pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof.DR. Suhadak, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
2. Bapak Prof.DR.Agus Suryono, MS dan Endah Setyowati, S.Sos., Msi selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan menasehati penulis.
3. Bapak Drs. Sulihtiyono,MPd selaku Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi
4. Bapak Drs. Ahmad Khoirullah,MM Kabid Pendidikan TK/SD yang telah memberikan informasi dan kerjasamanya.
5. Bapak Taman selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang telah memberikan informasi dan bantuannya.
6. Ibu.Hj.Suhernik, MPd selaku Kepala Sekolah SDN 4 Penganjuran.
7. Ibu Retno selaku Staf yang telah memberikan informasi dan bantuannya.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini bermanfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan serta pihak-pihak yang membutuhkan.
9. Para tokoh masyarakat yang telah memberikan informasi,serta pihak-pihak lain yang ikut membantu terselesaikannya penyusunan skripsi.

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta memberikan kontribusi yang positif dalam bidang kajian akademik, sehingga benar-benar bermanfaat bagi pembacanya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan penelitian selanjutnya serta tambahan pengetahuan bagi penulis

Malang, Januari 2008

Penulis





DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN	i
SUMMARY	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemerintahan Daerah.....	9
1. Pengertian Pemerintahan Daerah	9
2. Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah	10
3. Kepegawaian Daerah	11
4. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan di Bidang Pendidikan	13
5. Implementasi Kebijakan Publik	14
a. Pengertian Kebijakan Publik.....	14
b. Implementasi Kebijakan Publik	16
6. Pemrosesan Konsep Pendidikan	18
7. Otonomi Pendidikan	19
8. Anggaran Pendidikan	19
9. Kebijakan Pendidikan	20

B. Pengembangan Sumber Daya Guru Sekolah Dasar (SD)	21
1. Pengembangan	21
2. Unsur Pengembangan	22
3. Unsur Motivasi.....	23
4. Sumber Daya Guru Sekolah Dasar	25
5. Bentuk-bentuk Pengembang sumber daya guru SD.....	31
C. Kualitas Pendidikan	39
1. Pendidikan.....	39
2. Kualitas	41
3. Komponen yang mempengaruhi kualitas pendidikan dasar.....	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	47
B. Fokus penelitian	47
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	48
D. Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Instrumen Penelitian	50
G. Analisa Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data	52
1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Banyuwangi.....	52
a. Keadaan Geografis dan Fisik Dasar	52
b. Pola Penggunaan Lahan	52
c. Fasilitas Pendidikan.....	55
d. Fasilitas Kesehatan.....	55
e. Fasilitas Perdagangan	55
f. Fasilitas Olah Raga dan Rekreasi	56
2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	56
a. Kepemimpinan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi ..	56
b. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	56

c. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	57
d. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	58
3. Gambaran Umum SD di Kabupaten Banyuwangi	60
B. Data Fokus Penelitian	61
1. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Guru SD di Kabupaten Banyuwangi	61
a. Kegiatan yang dilakukan secara teratur melalui sistem gugus sekolah	61
b. Kegiatan yang dilakukan secara temporer	69
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan yang dicapai di Kabupaten Banyuwangi	72
a. Nilai rata-rata Ujian Akhir Sekolah (UAS)	72
b. Tingkat Kelulusan Ujian Akhir Sekolah Dasar	73
3. Faktor Penghambat dan Pendukung	74
a. Faktor Penghambat	74
b. Faktor Pendukung	75
C. ANALISA DATA FOKUS	76
1. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Guru SD di Kabupaten Banyuwangi	76
a. Kegiatan yang dilakukan secara teratur dalam gugus sekolah	76
b. Kegiatan yang dilakukan secara temporer	79
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan yang dicapai di Kabupaten Banyuwangi	81
a. Nilai rata-rata Ujian Akhir Sekolah (UAS)	81
b. Tingkat Kelulusan Ujian Akhir Sekolah Dasar	82
3. Faktor Penghambat dan Pendukung	83
a. Faktor Penghambat	83
b. Faktor Pendukung	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 85

B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP





DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Penggunaan Lahan di Wilayah Perencanaan Kota Banyuwangi	53
2	Angka Banding Lantai Bangunan di Kota Banyuwangi.	54
3	Kondisi Bangunan di Kota Banyuwangi.	54
4	Jumlah SD di Kabupaten Banyuwangi	60
5	Kegiatan secara umum dalam KKG (semester Genap dan ganjil)	65
6	Jadwal pelatihan pakem III kabupaten Banyuwangi	71
7	Nilai rata-rata ujian akhir sekolah SD di Kabupaten Banyuwangi	73
8	Tingkat kelulusan ujian akhir sekolah SD di Kabupaten Banyuwangi per 2004/2005, 2005/ 2006, 2006/ 2007	73





DAFTAR BAGAN

No	Judul	Halaman
1	Bagan susunan organisasi dinas pendidikan Kabupaten Banyuwangi	59
2	Gugus sekolah 06 Kecamatan Banyuwangi	63
3	Tempat pelaksanaan dan peserta KKG	64



DAFTAR LAMPIRAN

Hal

Lampiran 1. :



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 meliputi peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, masyarakat di daerah-daerah konflik, ataupun masyarakat penyandang cacat.

Dan saat ini negara Indonesia sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan. Pembangunan ini tentunya tidak berhenti setelah mencapai titik tertentu melainkan terus menerus atau berkesinambungan. Dalam melaksanakan pembangunan faktor SDM merupakan faktor utama. Setiap negara memerlukan SDM yang berkualitas, memiliki kemampuan untuk mengelola dan memajukan negaranya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Berbicara mengenai kualitas SDM tentu tidak terlepas dari unsur pendidikan. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas SDM oleh karena itu wajar bila “mencerdaskan kehidupan bangsa” menjadi salah satu tujuan negara seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea IV yang kemudian dijabarkan pada pasal 31 yakni :

- (1). Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
- (2). Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Dari pasal di atas dapat kita ketahui bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab besar menyelenggarakan suatu pengajaran nasional guna mewujudkan bangsa yang cerdas dan manusia yang berkualitas. Untuk itu kemudian dibuat satu undang-undang yang mengatur pelaksanaannya yakni undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia

yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Pasal 39 Ayat (2) Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip – prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang memperoleh pendidikan yang bermutu.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan melalui tiga jalur yakni jalur pendidikan formal atau jalur pendidikan sekolah, dan jalur pendidikan non formal atau jalur pendidikan luar sekolah, dan jalur pendidikan informal atau jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Selanjutnya jalur pendidikan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah jalur pendidikan formal yaitu jalur pendidikan sekolah.

Pendidikan formal atau pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diperoleh seseorang di sekolah secara teratur, sistematis, bertingkat dan mengikuti syarat yang jelas dan ketat, mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi (Hasbullah, 2001 : 46). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan sekolah merupakan pendidikan berjenjang sesuai dengan tingkat usia anak didik dalam jangka waktu tertentu dan mengikuti syarat-syarat tertentu. Jenjang pendidikan ini dibagi menjadi tiga yakni jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari proses pembelajaran di sekolah merupakan pendidikan yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan dasar adalah untuk memberikan bekal kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta

mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah (Depdiknas, 2003 : 14).

Di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut :

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia
2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar
3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral
4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global, dan
5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dengan demikian pendidikan dasar di Indonesia dilaksanakan untuk mewujudkan bangsa yang cerdas melalui pembekalan pengetahuan dasar kepada peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.

Pendidikan dasar di Indonesia dilaksanakan selama 9 tahun sebagai program wajib belajar yang mencakup pendidikan di tingkat SD selama 6 tahun dan SLTP selama 3 tahun. Sekolah dasar sebagai bagian dari pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang memberikan pengetahuan kepada siswanya sebagai bekal menuju jenjang pendidikan lanjutan sehingga keberadaannya menjadi sangat penting dan harus senantiasa diperhatikan.

Dalam proses pembelajaran di sekolah pada umumnya terdapat berbagai komponen yang membentuk dan mempengaruhinya. Salah satu komponen tersebut adalah guru yang memegang peranan sangat penting karena kemampuan guru dalam memberikan pengajaran dan pendidikan akan mempengaruhi terhadap pengetahuan dan pembentukan kepribadian siswanya. Dalam pengembangan pendidikan, pelaksanaan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi

pola hidup dan pola pikir manusia, oleh karena itu tenaga pendidik harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Dalam melaksanakan tugasnya, guru tidak saja bertanggung jawab terhadap aspek pengetahuan tetapi juga terhadap aspek mendidik kepribadian anak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa guru bertanggung jawab dalam mengajar ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) dan juga mendidik moral (*transfer of value*) yang mana seringkali diwujudkan dengan mendidik kepribadian, tanggung jawab, dan kemandirian anak sehingga ia berada dalam pengawasan guru atau berada dilingkungan sekolah. Maka dari itu sangat diharapkan keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab guru adalah tujuan untuk mencetak generasi bangsa yang unggul, yaitu manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani.

Guru yang tumbuh dan berkembang akan memperoleh suatu kemampuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan karena mereka dapat menciptakan pengajaran yang lebih dinamis dan sesuai dengan perkembangan jaman. Sumber daya guru merupakan pengembangan personal pendidikan karena sumber daya guru merupakan kunci pokok dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

Untuk mengupayakan pendidikan yang berkualitas maka diperlukan guru yang memiliki sumber daya yang berkualitas pula. Jadi, meningkatkan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang tidak terlepas dari proses pengembangan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, perbaikan kualitas pendidikan telah menjadi paradigma baru dalam pembangunan bangsa kita dengan cara pengembangan sumber daya gurunya.

Demikian pula pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, pengembangan sumber daya guru SD merupakan cara yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena SD merupakan lembaga pendidikan formal yang pertama kali harus ditempuh oleh masyarakat Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional bahwa “setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar”. (Depdiknas, 2003:24).

Guru ditingkat SD memiliki tugas yang tidak ringan karena sebagian besar guru SD di Indonesia adalah guru kelas. Seorang guru kelas dituntut untuk mampu menyampaikan berbagai bidang studi, padahal setiap bidang studi memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi materi, metode penyampaian maupun alat peraganya. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri bagi guru karena mereka harus mampu menguasai berbagai tehnik pelajaran sesuai dengan tuntutan bidang studi. Jadi, guru harus mempunyai kemampuan dan kesabarab dalam mendidik anak-anak tersebut. Dengan begitu, pengembangan sumber daya guru SD harus terus dilakukan.

Peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dapat dilihat dari peran dan tanggung jawab guru dalam proses evaluasi pendidikan, dalam hal ini yang dievaluasi adalah hasil belajar siswa. Prestasi belajar siswa dapat digunakan sebagai salah satu alat ukur tingkat kualitas pendidikan, dimana hal ini dapat dilihat dari nilai Ujian Akhir Nasional (UNAS) siswa karena UNAS merupakan salah satu alat evaluasi yang memiliki peran substansial dalam menentukan kualitas pendidikan.

Ujian Akhir Nasional (UNAS) yang merupakan ujian penentuan bagi siswa untuk melanjutkan studinya ke jenjang berikutnya ini harus dilalui setiap siswa pada akhir jenjang sekolahnya. Untuk itu, siswa tersebut harus mengikuti UNAS dengan predikat lulus. Sedangkan untuk bisa lulus UNAS, siswa harus memenuhi standar kelulusan UNAS. Berkaitan dengan standar kelulusan UNAS pada tahun ajaran 2004/2005 pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 1 Tahun 2005 tentang Ujian Nasional (UNAS) yang menyatakan bahwa standar minimal kelulusan meningkat menjadi 4,25 dari yang tadinya 4,01. adanya kenaikan standar kelulusan UNAS ini bukanlah suatu masalah bagi sekolah yang mempunyai predikat bagus dan hasil lulusan yang telah diakui kemampuannya. Namun bagi sekolah-sekolah yang berada di pedesaan ataupun di daerah-daerah yang kurang maju, dimana masalah-masalah seputar kelancaran kegiatan belajar mengajar selalu ada saja kendalanya, misalnya kurang memadainya sarana dan prasarana yang tersedia, kurangnya jumlah guru

yang mengajar dan sebagainya. Bagi siswa di selokah yang berada di daerah pedesaa. atau daerah yang kurang maju tersebut tentu saja akan merasa keberatan dengan kenaikan standar kelulusan tersebut. Hal ini dikhawatirkan akan menambah tingginya prestasi ketidaklulusan UNAS pada tahun–tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan guru SD di Kabupaten Banyuwangi, kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilimpahkan kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan yang secara langsung yang menyelenggarakan kegiatan tersebut adalah dari pihak cabang dinas di masing–masing kecamatan di Kabupaten Banyuwangi melalui persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Berkaitan dengan hal diatas, kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya guru SD tersebut meliputi sarana dan prasarana yang kurang dan juga masalah pendanaan. Keterbatasan sarana dan prasarana tersebut berkaitan erat dengan keterbatasan dana. Faktor lain yang kurang dapat meningkatkan sumber daya guru SD adalah waktu pelaksanaan, karena para guru juga mempunyai kesibukan masing–masing sehingga kadang terbentur dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan.

Berpijak dari fenomena diatas, maka peneliti akan menelaah lebih jauh mengenai kegiatan apa yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi terkait dengan meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara pengembangan sumber daya guru SD di Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian sangatlah penting diadakan penelitian yang berjudul **“Pengembangan Sumber Daya Guru SD Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pedidikan”** (studi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, perumusan masalah sangat penting diperlukan untuk memberikan ketearahan dalam penelitian dan memfokuskan pada suatu permasalahan guna mencapai jawabannya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana implementasi kegiatan pengembangan SDM guru Sekolah Dasar di kabupaten Banyuwangi ?

2. Bagaimana peningkatan kualitas pendidikan yang telah dicapai terkait pelaksanaan pengembangan SDM guru Sekolah Dasar di Kabupaten Banyuwangi ?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengembangan sumber daya guru Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Banyuwangi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi kegiatan pengembangan SDM guru Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui peningkatan kualitas pendidikan yang telah dicapai terkait pelaksanaan pengembangan SDM guru Sekolah Dasar di Kabupaten Banyuwangi.
3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengembangan sumber daya guru Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Banyuwangi.

D. Kontribusi Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan sumbangan pemikiran bagi Kepala Sekolah dasar dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan SDM guru Sekolah Dasar.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi guru Sekolah Dasar dalam meningkatkan mutu pelajaran serta melancarkan belajar mengajar melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan SDM guru.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai upaya pengembangan keilmuan khususnya administrasi publik konsentrasi Sistem Pemerintahan Daerah.
 - b. Sebagai referensi bagi peneliti lanjutan tentang hal yang sama dengan penelitian ini.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN, menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, mencakup teori dari berbagai literatur yang berkaitan dan mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini, yang terdiri dari : Pertama Pengertian pemerintahan daerah, bentuk dan susunan pemerintahan daerah, kepegawaian daerah, kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan di bidang pendidikan, implementasi kebijakan publik, pemrosesan konsep pendidikan, otonomi pendidikan, anggaran pendidikan, kebijakan pendidikan. Kedua : Pengembangan, unsur pengembangan, unsur motivasi, sumber daya guru Sekolah Dasar, bentuk- bentuk pengembangan sumber daya guru SD. Ketiga : Pendidikan, kualitas, komponen yang mempengaruhi kualitas pendidikan dasar.

BAB III : METODE PENELITIAN, mencakup jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisa data

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN, memuat gambaran umum wilayah kabupaten banyuwangi, gambaran umum Dinas Pendidikan di kabupaten Banyuwangi, gambaran umum SD di kabupaten Banyuwangi, hasil data fokus penelitian, analisa data fokus.

BAB V : PENUTUP, merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran sebagai rekomendasi ke arah perbaikan dalam rangka mengembangkan sumber daya guru SD.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PEMERINTAHAN DAERAH

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Dalam UU sebelum UU 22/1999 pemerintah daerah (*local authority*) sebagai organ pelaksana pemerintah di daerah selalu tepat asas dengan mencakup DPRD (*council*) dan Kepala Daerah (*mayor*). Akan tetapi, pada UU tersebut istilah pemerintah daerah hanya diperuntukkan bagi kepala daerah beserta perangkat daerah dan tidak mencakup DPRD yang disebut sebagai Badan Legislatif Daerah. Kondisi ini disebut sebagai tidak taat asas oleh Hoessein dan Atmosudirdjo karena hanya DPR yang mempunyai fungsi legislatif dan menjadi bagian dari badan legislatif bersama presiden dalam tata hukum kita. DPRD sebenarnya bagian dari badan eksekutif daerah yang memiliki fungsi pengaturan, penganggaran, dan pengawasan. Untuk mengakomodasi persoalan tersebut, para pembuat UU 32 tahun 2004 menghilangkan penggunaan istilah badan eksekutif daerah bagi pemerintah daerah dan badan legialatif daerah bagi DPRD. Meskipun demikian, istilah pemerintah daerah tetap menunjuk pada kepala daerah dan perangkat daerah. Kini DPRD dan pemerintah daerah disebut sebagai penyelenggara pemerintah daerah sebagai terjemah dari *local government* atau *local authorities*.

Dalam kerangka ini, sebenarnya organ pemerintah untuk daerah provinsi adalah DPRD dan Gubernur. Gubernur memiliki dua status yakni sebagai kepala daerah provinsi untuk menjalankan desentralisasi dan sebagai wakil pemerintah pusat untuk menjalankan tugas dekonsentrasi. Sebagai kepala daerah, gubernur bertanggung jawab kepada DPRD provinsi. Sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Organ pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas DPRD kabupaten/kota dan kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya. Kepala daerah untuk kabupaten disebut sebagai bupati dan untuk kota disebut sebagai walikota. Bupati/walikota semata menjalankan tugas desentralisasi secara bulat dan tidak menerima tugas dekonsentrasi. Baik bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota

adalah lembaga politik karena proses pengisiannya melalui cara dipilih (*elected*) secara demokratis dan terbuka bagi para partai politik. Kini kepala daerah dan anggota DPRD dipilih secara langsung oleh masyarakat. Sementara itu, perangkat daerah merupakan birokrasi daerah otonom yang proses pengisiannya atas dasar pengangkatan (*appointed*) dan tertutup bagi partai politik. Proses pengisian seperti ini untuk birokrat daerah dimaksudkan untuk menjamin netralitas. Perangkat daerah ini terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya sesuai kebutuhan daerah. Lembaga teknis ini bisa berupa badan, kantor, kecamatan, kelurahan, dan sebagainya.

Organ pemerintah daerah kabupaten/kota ini berdiri sendiri dan terpisah dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat sebagai wujud prinsip otonomi nyata. Pola anggota DPRD dan kepala daerah yang dipilih dan birokrat dalam perangkat daerah yang diangkat ini berlaku seragam diseluruh Indonesia. Pola organ pemerintahan daerah (DPRD dan kepala daerah) ini relatif sama walau memiliki istilah yang berbeda-beda sepanjang sejarah perkembangan UU pemerintahan daerah di Indonesia setelah masa kemerdekaan. Dalam masa reformasi, melalui UU 22/1999 pendulum beralih arah kembali menuju lebih kuatnya peran DPRD daripada kepala daerah dalam pemerintahan daerah. Kini berdasarkan UU 32 tahun 2004 pendulum kekuasaan bergeser kembali menjauh dari DPRD menuju keseimbangan kekuasaan antara DPRD dan kepala daerah. Kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat dan tidak dapat diperhentikan oleh DPRD namun DPRD tetap memiliki tiga fungsi yang cukup kuat yakni legislatif, anggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, tampaknya pendulum kekuasaan memang sedang bergerak ketengah pada titik *equilibrium* antara dua kekuatan.

2. Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah.

Seperti dinyatakan dalam pasal 14 UU No 32 Tahun 2004 yaitu (1) di bentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah (2) Pemerintahan Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya yaitu :

- Kepala Daerah Propinsi disebut Gubernur
- Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati
- Kepala Daerah Kota disebut Walikota

Sedangkan Perangkat Daerah sesuai dengan pasal 60 terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah. Berkaitan dengan dinas daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah daerah, maka di tingkat Kabupaten atau Kota Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan pasal (8) PP No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kabupaten atau Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten atau Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut maka Dinas Kabupaten atau Kota mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum
- Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya

Pada Dinas kabupaten atau Kota juga dapat dibentuk Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berfungsi melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Dimana Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

3. Kepegawaian Daerah

Perubahan kebijakan desentralisasi juga diikuti dengan perubahan dibidang kepegawaian daerah dari UU No 8 Tahun 1974 menjadi UU No 43 Tahun 1999. berdasarkan kebijakan desentralisasi dan kepegawaian yang lama, tampaknya sistem kepegawaian daerah yang berlaku dalam praktik lebih mirip dengan *integrated national and local personnel system*. Kelebihan nyata dari cara tersebut adalah kemampuan yang luar biasa dari pemerintah untuk menempatkan pegawainya dilokasi yang paling terpencil sekalipun (Niessen,1999) guna memberikan pelayanan, terutama untuk menjalankan tugas pembangunan. Meskipun demikian, kelemahan masih tampak dari pengelolaan pegawai negeri ini masih berkisar pada fenomena *understaffed and overstaffed* bahwa pada waktu yang bersamaan pemerintah daerah mengalami kelebihan pegawai yang kurang

cocok kualifikasinya dengan pekerjaan, namun di lain pihak ia juga mengalami kekurangan pegawai dengan kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaan.

Kebijakan baru desentralisasi dan kepegawaian daerah tampaknya ingin membenahi hal tersebut dengan memberikan kewenangan yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola sendiri pegawai negerinya sekaligus tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan ini mengarah pada jenis *separate personnel system for each local authority*. Kebijakan kepegawaian bertujuan untuk mendorong pengembangan otonomi daerah. Pemerintah pusat menetapkan norma, standar, dan prosedur mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban serta kedudukan hukum baik PNS daerah maupun PNS pusat. Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan, dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan normatif kepegawaian yang berlaku seragam bagi PNS daerah diseluruh Indonesia, sedangkan pelaksanaannya menjadi kewenangan daerah.

Di Indonesia, pegawai negeri dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yakni pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pegawai negeri sipil dibagi menjadi dua, yakni PNS pusat dan PNS daerah. PNS daerah merupakan salah satu jenis pegawai yang menjalankan perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain PNS daerah, ada pula jenis pegawai lain yang bekerja dalam pemerintahan daerah yang disebut pegawai tidak tetap namun tidak tergolong sebagai PNS.

Dengan baru dimulainya perubahan sistem kepegawaian daerah dari *integrated* ke *separate personnel system*, maka efektifitas sistem ini masih membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk dievaluasi. Meskipun kebijakan normatifnya seragam di seluruh Indonesia, pelaksanaannya di lapangan bergantung pada kesiapan masing-masing daerah. Setiap daerah memiliki derajat kekentalan yang khas dalam hal *spoil* atau *patronage*. Ada yang masih kuat

mendasarkan diri pada suku, keluarga, daerah, alumni, partai politik, golongan dan sebagainya. Selain itu, gejala formalisme juga masih tampak kuat didaerah meski dengan kadar yang berbeda-beda. Semua ini tentu mempengaruhi kualitas profesionalisme, keadilan, dan efektifitas pelaksanaan *merit system*. Meski praktik tersebut tidak konstitusional lagi, namun dalam kenyataan sehari-hari masih sangat mungkin terjadi dan dapat memicu pesatnya praktik KKN bila tanpa pengawasan yang efektif dan memadai.

4. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Di Bidang Pendidikan.

Tugas umum pemerintahan adalah kegiatan yang secara rutin dilakukan oleh pemerintah pada umumnya dalam rangka pemberian pengayoman dan pelayanan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam rangka fungsi pengayoman dan pelayanan tersebut tercakup tugas pokok perumusan dan penetapan kebijakan nasional, kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis yang meliputi : pemberian, bimbingan, pembinaan dan perizinan; pengelolaan kekayaan milik Negara; penyediaan informasi dan sebagainya.

Menurut teori klasik ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi Negara mengajarkan bahwa pada hakekatnya pemerintahan Negara menyelenggarakan dua fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi pengaturan

Dasar dan titik tolak penyelenggaraan fungsi pengaturan ialah bahwa Negara adalah suatu negarahukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara semua orang dan semua pihak terikat/ taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara yang bersangkutan.

2. Fungsi pelayanan

Fungsi pelayanan berarti bahwa pemerintah Negara bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat itu mengejawantahkan dalam bentuk pelayanan aparatur pemerintah kepada para warga yang memerlukannya. Itulah sebabnya aparatur pemerintah menyelenggarakan “pelayanan umum”(public servise) dan

para pegawai negeri dikenal dengan istilah “abdi masyarakat” (*public servants*) (Sondang, 1992:129-131)

Sedangkan dalam pembangunan khususnya di bidang pendidikan, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang tertuang dalam pasal 7 UU RI No. 32 tahun 2004, yaitu:

1. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.
2. Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang Perencanaan Nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi Negara dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

5. Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan dibuat oleh para pejabat pemerintah untuk memberikan keabsahan atau memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan Negara. Dengan kata lain, kebijakan dibuat oleh sistem, dan disahkan oleh pemerintah yang merupakan pembuat kebijakan atau actor yang memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan (Samodra Wibawa, 1994:22)

Dye (1987:3) mendefinisikan kebijaksanaan Negara sebagai “*is whatever governments choose to do or not to do*” (“apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”). Selanjutnya Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijaksanaan Negara itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan Negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilaksanakan” oleh pemerintah akan

mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah.

Dari definisi Dye diatas, konsekuensinya adalah kebijakan publik itu lebih banyak mengedepankan peran Negara atau pemerintah. Tokoh lainnya yaitu Anderson (1979:3) mengatakan :

“Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials” (“Kebijakan Negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah”). Menurut Anderson, implikasi dari pengertian kebijaksanaan Negara tersebut adalah: (1) bahwa kebijaksanaan Negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan; (2) bahwa kebijaksanaan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah; (3) bahwa kebijaksanaan itu adalah merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau akan menyatakan akan melakukan sesuatu; (4) bahwa kebijaksanaan Negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negative dalam arti : merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; dan (5) bahwa kebijaksanaan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti positif didasarkan atau dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (koersif).

Definisi lain juga dikemukakan oleh W.I Jenkins (Abdul Wahab, 2002:4) yang mengatakan bahwa kebijaksanaan Negara adalah :

“A set interrelated decisions taken by a political actor or group of actor concerning the selections of goals and the means of acheieving them within a specified situation where these decision should, in principle, be within the power of these actors to achieve” (“serangkaian keputusan yang saling berkaitan, yang diambil oleh seorang actor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kekuasaan dari para aktor tersebut”).

David Easton (Islamy, 2002:19), memberikan arti kebijaksanaan Negara sebagai

“*The authoritative allocation of values for the whole society*” (“pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat”) berdasarkan definisi ini Easton menegaskan hanya pemerintahlah yang secara sah dapat berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk penglokasian nilai-nilai pada masyarakat hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam apa yang oleh Easton disebut sebagai “*authorities in a political system*”, yaitu para pengusaha dalam suatu system politik yang terlibat dalam masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggungjawab atau perannya. Dari definisi Easton ini, sudah mulai melibatkan peran citizen atau warga Negara, tetapi warga Negara masih sebagai objek kebijakan.

Dari beberapa pengertian kebijakan Negara diatas, bagaimanapun rumusnya pada hakekatnya bahwa kebijakan Negara mengarah kepada kepentingan publik, dengan pertimbangan nilai-nilai yang ada. Seseorang atau sekelompok aktor politik harus senantiasa memasukkan pikiran-pikiran publik dalam wacana politiknya, dan bukan hanya pikirannya tau kemauannya semata-mata sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian kebijakan Negara dapat disimpulkan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

b. Implementasi Kebijakan Publik

Pelaksanaan kebijakan yang sering disebut sebagai implementasi suatu kebijakan merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perumusan kebijakan (*policy formulation*), penetapan kebijakan (*policy adaption*) dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*).

Setelah kebijakan publik itu disahkan oleh pihak yang berwenang maka kebijakan itu telah memiliki kekuatan hukum sehingga itu telah siap dilaksanakan atau diimplementasikan. Kebijakan publik memiliki arti yang sebenarnya bila telah diimplementasikan sesuai dengan kehendak, kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Van Metter dan Van Horn (Mas Roro Lilik Ekowati, 2005:54), implementasi adalah sebagai suatu rangkaian kegiatan yang disengaja dilakukan untuk meraih kinerja. Metter dan Horn merumuskan sebuah abstraksi yang melibatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja kebijakan.

Menurut George C Edward III (Mas Roro Lilik Ekowati, 2005:32), ada 4 variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan public. Variable-variabel itu antara lain (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) sikap/disposisi, (4) struktur birokrasi.

Sedangkan faktor-faktor dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah :

- a. Persetujuan, dukungan, dan kepercayaan rakyat

Tiga hal ini dapat menimbulkan partisipasi masyarakat yang benar-benar diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan

- b. Isi dan tujuan kebijaksanaan

Isi dan tujuan harus dimengerti secara jelas oleh para pelaksana kebijakan, para pelaksana kebijakan mampu menginterpretasikan kebijakan yang telah ditetapkan sehingga mempunyai persepsi seperti yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan.

- c. Pelaksanaan harus mempunyai cukup informasi mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat.

- d. Pembagian pekerjaan harus dilakukan secara efektif dan terorganisir dengan baik.

- e. Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan.

- f. Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadahi dalam pelaksanaan kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan publik pada umumnya masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran, dan berbagai sarana kemudian diterjemahkan ke dalam program-program yang lebih operasional (program aksi) yang semuanya dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan-perubahan yang

berhubungan dengan keamanan, kemajuan, dan kesejahteraan rakyat (Soenarko, 2000 :99)

Dalam masyarakat modern dewasa ini, menurut Cole S. Brembeck (The Liang Gie, 1998 :46), pendidikan mempunyai 6 tugas pokok yaitu:

1. *The transmission of culture* (pengalihan kebudayaan)
2. *The transmission of skill* (pengalihan ketrampilan-ketrampilan)
3. *The transmission of values and beliefs* (pengalihan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan)
4. *Preparation of working life* (persiapan untuk kehidupan kerja)
5. *The caretaking of youth* (pengurusan anak)
6. *Promotion of peer-group relation* (pemupukan hubungan kelompok sebaya)

Jadi dengan demikian pendidikan merupakan gejala insani yang fundamental dalam kehidupan manusia untuk mengantarkan anak manusia ke dunia peradaban. Pendidikan juga merupakan bimbingan eksistensial manusiawi dan bimbingan otentik, agar anak belajar mengenali jati dirinya, bisa bertahan hidup dan mapu memiliki, melanjutkan serta mengembangkan warisan-warisan generasi yang terdahulu.

6. Pemrosesan Konsep Pendidikan

Urusan pendidikan adalah urusan kita semua, jadi kelas bukan eksklusif menjadi urusan pemerintah atau para ahli pendidikan saja. Oleh karena kebijakan-kebijakan makro oleh pemerintah pada taraf nasional dan regional bagi system pendidikan nasional itu tidak beroperasi dengan mantap, apabila tidak didukung oleh upaya mikro berupa pemahaman, pemikiran, dukungan, dan partisipasi aktif segenap warga masyarakat.

Usaha makro oleh pemerintah dalam mengelola system pendidikan-pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang dan UUD 1945 Pasal 31, menyangkut *good-will* politik dan keputusan politik yang harus dipatuhi. Sedang partisipasi aktif warga masyarakat/rakyat dalam ikut mengonseptualisasikan dan mengelola sistem pendidikan-pengajaran yang fungsional bagi individu dan rakyat.

Rakyat merupakan subyek bebas yang mempunyai misi hidup dan martabat, punya kemauan bebas, serata punya hak kewajiban untuk ikut memikirkan dan menentukan jenis pendidikan dan sekolah yang benar-benar mereka butuhkan.

7. Otonomi Pendidikan

Perubahan paradigma dalam era otonomi daerah yang terkait dengan perencanaan berbagai program pembangunan daerah, termasuk didalamnya perencanaan sektor ekonomi, penyusunan perencanaan program pendidikan menjadi lebih bertumpu pada prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat dan pemberdayaan potensi sumber daya perencanaan yang dimiliki oleh daerah.

Otonomi dalam sektor pendidikan dipahami sebagai pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara professional untuk mengambil prakarsa dan merumuskan perencanaan pendidikan secara partisipatif, koordinatif dengan memberdayakan segenap potensi sumber daya perencanaan yang dimiliki. H.A.R Tilaar (dalam Daeng Sudirwo, 2000:59-60) mengemukakan bahwa desentralisasi pendidikan ternyata merupakan suatu proses yang kompleks, hal ini disebabkan desentralisasi:

1. Akan menciptakan suatu sistem pendidikan dengan kebijakan yang konkret.
2. Mengatur sumber daya serta manfaatnya.
3. Melatih tenaga-tenaga manajer pada tingkat lapangan.
4. Menyusun kurikulum yang sesuai.
5. Mengelola system pendidikan yang berdasarkan kepada kebudayaan setempat.

Melalui otonomi pendidikan ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintah di tingkat lokal punya peranan yang lebih aktif dan responsive terhadap kebutuhan dunia pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat di tingkat lokal, tentu dengan memperhatikan kemampuan sumber daya daerah yang dimiliki.

8. Anggaran Pendidikan

Menurut Prawiraamidjaja, R.A Rahman (1974:36), anggaran pendidikan ialah :

“Salah satu pos/sektor penganggaran belanja Negara atau belanja daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan yang meliputi pembiayaan proses kegiatan belajar-mengajar, pembangunan sarana dan prasarana, biaya pelatihan guru secara kontiyu, peningkatan kesejahteraan pendidik, pemerataan pendidikan dan lain sebagainya. Dana pendidikan ini juga terkait dengan belanja rutin maupun pembiayaan sarana pendidikan”

Dana pendidikan yang dianggakan dalam APBN maupun dalam APBD setiap tahunnya secara normative harus dianggarkan 20% dari APBN maupun APBD. Hal ini sesuai dengan amandemen UUD 1945 pasal 31 ayat (4). Lebih jelas lagi, hal ini diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas yang mengatur penganggaran dana pendidikan sebesar 20 persen diluar gaji pokok guru pada APBN atau APBD.

Dalam hal ini dana pendidikan dalam APBD akan diserahkan pada Dinas Pendidikan yang ada didaerah untuk dikelola bagi pelaksana kegiatan pendidikan. Perhatian masalah pendidikan di Indonesia selama ini kurang memadai dan hal ini di buktikan dengan persentase alokasi dana anggaran untuk sektor pendidikan jauh dibawah standar Negara-negara maju dan berkembang lain di dunia. Padahal dengan terjaminnya dana pendidikan tersebut akan memberi jaminan terciptanya generasi muda yang berkualitas.

9. Kebijakan Pendidikan

Pada hakekatnya, pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia baik didalam maupun diluar sekolah. Usaha itu menurut Nawawi (1987:3) diselenggarakan dalam berbagai berikut:

- a. Usaha pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja, berencana, terarah, dan sistematis melalui suatu lembaga yang disebut “pendidikan formal”
- b. Usaha pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja akan tetapi tidak berencana dan tidak sistematis dilingkungan keluarga disebut “pendidikan informal”
- c. Usaha pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja dan berencana tetapi tidak sistematis diluar lingkungan keluarga dan lembaga pendidikan formal disebut pendidikan “non formal”

Hal ini di jelaskan pula dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disebutkan bahwa pendidikan ini dapat ditempuh melalui beberapa jalur, yaitu :

“Pendidikan diselenggarakan pada jalur formal, non formal, dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dsapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Dan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Melalui deskripsi diatas dapat disimpulkan penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan melalui jalur formal, non formal, dan informal serta dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin setiap warga Negara Indonesia untuk mendapatkan haknya dalam memperoleh pendidikan yang layak.

Setelah terjadi amandemen dalam UUD 1945, dibidang pendidikan terjadi perubahan yang spesifik, penting dan melegakan yaitu diaturnya pengalokasian ideal anggaran pendidikan minimal 20 persen dari belanja APBN dan APBD. Pelaksanaan kegiatan pendidikan di Indonesia telah mendapat jaminan yang kuat tentang adanya ketersediaan dana pendidikan melalui landasan konstitusi amandemen UUD 1945 pasal 31 ayat (4). Dengan demikian kebijakan mengenai kelangsungan dunia pendidikan di Indonesia telah diformulasikan melalui amandemen UUD tersebut, saat ini tinggal bagaimana implementasi kebijakan tersebut oleh penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah ditingkat pusat maupun pemerintah ditingkat lokal.

B. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA GURU SEKOLAH DASAR (SD)

1. Pengembangan

Dalam kehidupannya, manusia dianugerahi berbagai potensi oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjalani hidupnya dan untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Potensi yang dimiliki itu bisa berupa tenaga, sikap, kemampuan, ide-ide, atau gagasan-gagasan hasil olah pemikirannya.

Dengan segala potensi yang dimilikinya, manusia bisa mengatur kehidupannya dengan baik. Oleh karena itu, potensi tersebut harus senantiasa digali dan dikembangkan secara terus menerus demi mengarahkan potensi

tersebut ke arah yang positif, bukan disalahgunakan ke arah perbuatan negatif, yang akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi, pengembangan ke arah yang benar merupakan suatu hal yang amat penting dalam kehidupan manusia. Adapun pengembangan diartikan oleh Flippo dalam Masud (1985:12), bahwa “pengembangan adalah suatu kegiatan yang meliputi, baik pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan melaksanakan pekerjaan tertentu, maupun pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan umum dan pemahaman atas keseluruhan lingkungan”

Sedangkan Moekijat (1991:8), mendefinisikan bahwa :

“Pengembangan adalah setiap usaha untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberikan informasi, mempengaruhi sikap atau menambah kecakapan. Dengan kata lain, pengembangan adalah setiap kegiatan yang dimaksudkan untuk mengubah perilaku, yaitu perilaku yang berdiri dari pengetahuan, kecakapan dan sikap”.

Jadi pengembangan dalam hal ini adalah diartikan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pendidikan, kecakapan serta ketrampilan seseorang untuk dapat menunjang pelaksanaan tugasnya.

2. Unsur Pengembangan

Ada beberapa teori yang dianggap relevan dan akan dapat digunakan dalam rangka menjelaskan pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Teori tersebut antara lain:

a. Teori Mutu Model Manusia (Human Capital)

Konsep mengenai investasi sumber daya manusia sudah dipikirkan sejak jaman Adam Smith dan pakar teori klasik lainnya sebelum abad XIX yang menekankan pada investasi keterampilan melalui pendidikan. Teori ini sebagaimana diungkapkan oleh Effendi (1995:6) menyatakan bahwa

“Manusia adalah faktor yang amat penting selain tanah, teknologi, dan modal, oleh karena itu, bila produktifitas akan ditingkatkan, maka selain modal dan menambah input untuk meningkatkan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia perlu juga ditingkatkan dan

secara teoritis diyakini bahwa tersedianya sejumlah sumber daya manusia yang tidak berkualitas tidak akan menghasilkan keluaran output yang optimum”.

Dengan demikian proses perolehan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata tetapi juga merupakan suatu investasi.

b. Teori Pemecahan Masalah

Teori ini dikembangkan berdasarkan alasan tentang perlunya pengembangan sumber daya manusia, yakni karena kurangnya konsepsi pengembangan sumber daya manusia dan meningkatnya penyelesaian masalah baik sekarang maupun yang akan datang.

Effendi (1995:13) mengemukakan bahwa dengan teori ini para pelaku pengembangan dituntut untuk menyelesaikan masalah pembangunan secara tetap sekaligus menjadikan pelaku ini sebagai sumber efektif pembangunan dengan cara meningkatkan kemampuan berpikir, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan serta penguasaan informasi dan kemampuan memilih informasi yang dibutuhkan pembangunan.

Dalam teori ini telah jelas bahwa pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan merupakan unsur yang penting dalam meningkatkan kualitas manusia guna mengatasi dan memecahkan masalah-masalah pembangunan khususnya dibidang pendidikan pendidikan.

3. Unsur motivasi

Setiap orang melakukan sesuatu pasti didasari oleh adanya motif atau dorongan yang menyebabkan orang tersebut mau dan rela melakukannya. Demikian halnya dalam pembinaan profesional guru juga ada motif atau dorongan sehingga pembinaan ini perlu diselenggarakan. Di era globalisasi ini banyak dan sering terjadi perubahan termasuk perubahan di dunia pendidikan yang menuntut guru untuk melakukan penyesuaian. Agar para guru dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, maka harus memenuhi tuntutan dunia pendidikan yang semakin berkembang dengan meningkatkan kualitas dirinya

melalui upaya pembinaan profesional.

Banyak hal yang menjadi motif bagi seseorang untuk melakukan sesuatu antara lain akan dijelaskan dalam beberapa teori motivasi berikut ini :

1. Teori Hirarki Kebutuhan

Teori ini dikemukakan oleh Maslow, seperti dikutip oleh Arep dan Tanjung (2003:25) secara umum terdapat 5 hierarki kebutuhan manusia yakni :

- a. Kebutuhan Fisiologik (*Physiological needs*)
- b. Kebutuhan Keamanan (*Safety Needs*)
- c. Kebutuhan Kebersamaan (*Social Needs*)
- d. Kebutuhan Penghormatan dan Penghargaan (*Esteem Needs*)
- e. Kebutuhan Aktualisasi Diri (*Self Actualization Needs*)

Dengan adanya kebutuhan-kebutuhan di atas seseorang terdorong untuk melakukan suatu pekerjaan dengan harapan akan memperoleh imbalan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika seseorang telah memiliki pekerjaan maka ia akan berusaha mengembangkan diri dalam pekerjaannya.

2. Teori Penentuan Tujuan

Setiap tindakan yang dilakukan pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Siagian (1995:174) mengungkapkan bahwa “kejelasan tujuan yang hendak dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya akan menimbulkan motivasi yang semakin besar”.

Demikian pula pembinaan profesional bagi para guru SD sudah tentu memiliki tujuan. Agar hasil yang dicapai dalam pembinaan ini dapat optimal, maka harus dibarengi dengan motivasi yang kuat dari pesertanya.

3. Teori Harapan

Kuatnya kecenderungan seseorang bertindak dengan cara tertentu tergantung pada kekuatan harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti oleh hasil yang bermanfaat dan ada daya tarik dari hasil tersebut. Sebagaimana ditulis oleh Arep dan Tanjung (2003:32) teori ini dirumuskan sebagai berikut :

$$M = [(E-P)] [(P-O)]$$

Penjelasannya adalah :

M = Motivasi

E = Penghargaan (*expectation*)

P = Prestasi (*performance*)

O = Hasil (*outcome*)

V = Penilaian (*value*)

Dari teori ini dapat disimpulkan bahwa kuatnya motivasi seseorang tergantung pada kuatnya keyakinan bahwa akan mendapatkan apa saja yang hendak dicapai dan memperoleh imbalan yang memadai atas usaha yang telah dilakukan. Dengan demikian kunci dari teori ini adalah pemahaman seseorang akan kaitannya antara usaha dengan tujuan yang ingin dicapai.

4. Sumber daya guru Sekolah Dasar.

Apabila kita berbicara mengenai sumber daya guru SD maka hal ini tentu saja tidak terlepas dari sumber daya manusia itu sendiri, karena sumber daya guru SD merupakan bagian dari sumber daya manusia. Untuk itu, alangkah baiknya bila ditelaah terlebih dahulu mengenai sumber daya manusia.

a. Sumber Daya Manusia.

Dalam globalisasi setiap gerak langkah pembangunan diharapkan adanya hasil yang optimal. Hal ini bisa terwujud bila didukung oleh sumber daya yang cukup baik materi maupun non materi. Manusia adalah juga sumber daya produksi yang menempati posisi modal sentral pembangunan. Padanya terdapat nilai-nilai fisik dan non fisik. Darinya dapat diperoleh sumbangan tenaga serta ide-ide pemikiran dan gagasan yang berasal dari olah pikirannya. Dengan kata lain, manusia merupakan modal dasar pembangunan. Sehingga karena merupakan dasar (pondasi), maka ia harus teguh dan kokoh dalam menopang seluruh organ-organ atau bagian-bagian lain. Manusia sebagai subyek sekaligus obyek dalam pembangunan itu sendiri tentu saja melalui

penggalian secara terus menerus terhadap sumber-sumber terpendam yang terdapat didalam diri manusia Indonesia.

Pentingnya kedudukan Sumber Daya Manusia sebagai kunci keberhasilan semua aktifitas dan usaha manusia sejak dahulu maupun dimasa yang akan datang sama-sama kita sadari khususnya pada saat-saat sekarang ini, masalah yang menyangkut Sumber Daya Manusia baik dalam pendaayagunaannya, peningkatan kualitasnya, maupun pengembangannya selalu menjadi topik yang hangat dibicarakan orang dalam berbagai kesempatan. Namun sebelum dijelaskan lebih jauh tentang pengembangan Sumber Daya Manusia perlu adanya suatu pengertian tentang arti dan makna Sumber Daya Manusia.

Menurut Susilo Martoyo (1987:4), “Sumber Daya Manusia merupakan hasil akal budi manusia disertai pengetahuan serta pengalaman yang dikumpulkan dengan dengan sabar melalui jerih payah dan perjuangan yang berat”. Sedangkan menurut Soeroto (1983 : 4), Sumber Daya Manusia disebut sebagai kegiatan manusia yang produktif kepada masyarakat. Produktifitas ini perlu digali terus, sebab seberapapun kayanya suatu bangsa dalam hal Sumber Daya Alamnya, akan tetapi tanpa dukungan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai faktor vital yang mengelolanya, maka Sumber Daya Alam yang melimpah hanya sia-sia dan tidak memberi manfaat secara lebih efektif dan efisien.

Jadi Sumber Daya Manusia adalah semua kegiatan dan potensi manusia yang produktif yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berupa kebutuhan materi dan non materi demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Sumber Daya Manusia mencakup semua aspek-aspek kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh individu.

Sumber Daya Manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan, masa depan dan kemajuan bangsa kita ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki, disamping Sumber Daya Alam dan modal. Hal ini didasari bahwa peran manusia sangat

menentukan keberhasilan pembangunan nasional, bahkan dapat dikatakan bahwa manusia merupakan motor penggerak pembangunan. Baik itu sebagai subyek maupun obyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan, manusia bertindak sebagai pelaksana yang sangat menentukan bagi kelancaran dan keberhasilan pembangunan. Sedangkan sebagai obyek, manusia merupakan tujuan yang akan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Manusia yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, perlu sekali untuk mengetahui ciri-ciri manusia yang berkualitas. Secara garis besar kualitas manusia dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu :

1. Kualitas fisik yang mencerminkan ciri-ciri kualitas lahiriyah, seperti keserasian tinggi dan berat badan, daya fisik yang dimiliki, tingkat kesegaran dan kesehatan jasmani, tingkat konsumsi pangan yang bergizi dan lain-lain.
2. Kualitas non fisik, yang mencerminkan kualitas batiniah, seperti kualitas pribadi yang melekat pada diri seseorang, kualitas kelayakan seperti tercermin pada produktifitas, disiplin kerja, keswadayaan, keswakartaan dan wawasan masa depan, kualitas spiritual yang berpangkat pada iman dan budi pekerti, kualitas rasional akal pikiran dan kualitas berbangsa (Syamsuddin, 1995:35).

Sementara itu menurut Selo Soemardjan, manusia yang berkualitas harus memiliki ciri-ciri :

1. Manusia itu harus memiliki kepercayaan atas dirinya sendiri. Dia tidak boleh dihindangi rasa rendah diri (*Inferiority complex*) yang menimbulkan rasa pasrah atau menyerah pada nasib, sehingga dia menjadi pasif atau apatis terhadap kemungkinan perbaikan nasibnya. Dengan percaya terhadap dirinya sendiri (*self confidence*), manusia mempunyai kemampuan watak, bahwa dia mampu mengatur dan mengurus kehidupannya di tengah-tengah masyarakat.

2. Manusia pembangunan harus memiliki keinginan yang kuat untuk memperbaiki nasibnya, rasa bahagia yang dapat menghidupkan semangatnya bukan karena dia puas menikmati hidup yang sedang dialami. Rasa bahagia ini diperoleh karena dia mendapat kesempatan dan mampu berusaha mengarah pada tujuan hidup yang menurut anggapannya lebih tinggi dari pada yang telah dicapai. Kalau kesempatan yang diinginkannya itu tidak dengan sendirinya datang kepadanya, maka ia akan menciptakan kesempatan yang diinginkannya itu.
3. Terdorong akan keinginan yang tidak kunjung padam untuk memperbaiki nasib hidupnya, maka manusia pembangunan mempunyai watak yang dinamis, sehingga ia :
 - a. Pandai memanfaatkan setiap kesempatan yang menguntungkan baginya.
 - b. Mampu memecahkan persoalan hidup yang dihadapi.
 - c. Selalu siap menghadapi perubahan-perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat.
4. Manusia pembangunan harus bersedia dan mampu bekerja sama dengan manusia lain atas dasar pengertian dan penghormatan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
5. manusia pembangunan diharapkan memiliki watak yang sama, bermoral tinggi, antara lain : jujur, selalu menepati janji, serta menghormati hak dan kepentingan orang lain. (Abdul Hakim, 1995:5).

b. Guru Sekolah Dasar.

Berbicara tentang guru yang memiliki tugas yang mulia ini, mereka akan selalu dibutuhkan dalam kehidupan kita dan karena guru tersebut sangat berperan dalam mencetak generasi muda yang berguna bagi nusa dan bangsa, maka kualitas atau sumber daya guru senantiasa mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sumber daya guru mendapatkan perhatian dalam mewujudkan kualitas pendidikan, karena dalam upaya mewujudkan kualitas pendidikan komponen sumber daya

guru memiliki peran penting dan merupakan kunci pokok keberhasilan mewujudkan kualitas pendidikan.

Secara singkat Lavengeld dalam Sahertian (1990:13) mendefinisikan bahwa “guru adalah seorang pencerah masa depan”. Hal ini berarti bahwa seorang guru menjadi seorang yang sangat dibutuhkan untuk membawa kebaikan atau menjadikan segala sesuatu menjadi lebih baik pada masa yang akan datang.

Khusus mengenai guru SD, mereka mempunyai tugas yang sangat berat dalam menyampaikan berbagai macam mata pelajaran yang harus mereka kuasai sekaligus. Dan tidak seperti guru pada jenjang pendidikan lain, seperti SLTP dan SMU, para guru biasanya hanya mengajar satu mata pelajaran sehingga mereka hanya bertanggung jawab pada satu pelajaran itu saja. Sedangkan untuk guru SD, mereka harus bertanggung jawab terhadap semua mata pelajaran yang diajarkannya, padahal berbagai mata pelajaran tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, baik mengenai materi, metode maupun peralatan yang digunakan. Selain itu, karena SD merupakan lembaga sekolah yang paling awal yang harus dilalui oleh siswa, maka tidak jarang para siswa tersebut sangat sulit diatur karena masih dalam tahap penyesuaian diri dalam suasana yang formal. Dengan begitu, para guru harus lebih bisa membawa diri dan mengendalikan diri dengan baik.

Adapun tugas guru menurut Marion Edman seperti yang dikutip Sahertian (1990:38-39), dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

1. Tugas Profesional.

Tugas profesional menjadikan guru memiliki peranan profesi, yang termasuk peranan profesional ialah :

- a. Seorang guru yang diharapkan menguasai pengetahuan yang diharapkan. Sehingga ia dapat memberi kegiatan kepada siswa dengan berhasil baik.
- b. Seorang pengajar yang menguasai psikologi tentang anak.

- c. Seorang penanggung jawab dalam membina disiplin.
- d. Seorang penilai dan konseler terhadap kegiatan siswa.
- e. Seorang pengembang kurikulum yang sedang dilaksanakan.
- f. Seorang penghubung pada sekolah dan masyarakat, orang tua.
- g. Seorang pengajar yang terus menerus mencari (menyelidiki) pengetahuan yang baru dan ide-ide yang baru untuk melengkapi informasinya.

2. Tugas Personal.

Dalam tugasnya secara personal, guru melihat dirinya sebagai pemberi contoh. Seorang guru harus mampu berkaca pada dirinya sendiri, karena dengan berkaca atau melihat diri kita sendiri, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan termasuk menentukan mana yang terbaik yang diberlakukan. Kalau seseorang melihat dirinya sendiri, maka akan nampak bukan hanya satu pribadi, namun yang nampak adalah (a) dia dengan dirinya, (b) dia dengan keidealannya, (c) dia dengan konsepnya.

3. Tugas Sosial

Seorang guru adalah seorang pencerah jaman. Karena posisinya dalam masyarakat, maka tugasnya lebih dari tugas profesional. Ia juga harus mempunyai komitmen dan konsukuen terhadap masyarakat dalam peranannya sebagai warga negara dan sebagai agen pembaharuan atau seorang penceramah masa depan.

Dalam tugas sosialnya, sering terjadi hal yang kontradiksi, yaitu (a) pada satu pihak dia diharapkan untuk menjadi pemimpin tetapi pada saat yang sama dia diharapkan menjadi seorang pengikut yang taat, (b) pada satu saat dia diminta tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang harus ditaati tapi pada saat yang sama dia diharapkan

menjadi pembaharu atau inovator dari kemajuan zaman, (c) pada satu saat dia diharapkan dan dianggap sebagai anggota masyarakat, tapi pada saat yang sama dia dituntut juga untuk memilih keadaan masyarakat. (d) pada satu saat dia dituntut menjadi teladan yang baik, namun pada saat yang sama dia harus membela hak-hak kemanusiaan.

Dengan begitu pentingnya tugas seorang guru dalam dunia pendidikan kita, maka alangkah baiknya bila kemampuan seorang guru tersebut terus dikembangkan demi tercapainya guru yang bersumber daya tinggi. Selain itu, tugas seorang guru merupakan tugas berat, maka diharapkan guru bisa menjalankan tugas yang diembannya dengan sabar ikhlas, sepenuh hati dan juga bisa mengendalikan emosi dengan baik. Kemudian daripada itu, guru sebagai sumber daya manusia dalam dunia kependidikan sangat penting bagi mewujudkan kualitas atau kemajuan pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu meningkatkan sumber daya manusia guru SD merupakan usaha yang penting dalam dunia pendidikan di Indonesia demi untuk mendapatkan guru SD yang bermutu yaitu guru SD yang mempunyai kecakapan dan kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas yang dibebankan kepadanya, serta dapat memelihara dan meningkatkan kecakapan serta kemampuannya tersebut secara teratur dan pasti.

5. Bentuk-bentuk pengembangan sumber daya guru SD

Sebelum diuraikan mengenai bentuk-bentuk pengembangan sumber daya guru SD, berikut akan dipaparkan terlebih dahulu mengenai upaya peningkatan Sumber Daya manusia secara umum yang sering diberlakukan pada berbagai organisasi yang ada.

Dalam lingkungan organisasi, perusahaan maupun instansi, peningkatan Sumber Daya Manusia diprogram kedalam beberapa tehnik latihan yang sudah umum dikenal yang digunakan dewasa ini sebagaimana yang diutarakan oleh Moenir (1983:24) bahwa “Pengembangan pegawai terdiri atas tiga jenis, (1) pendidikan dan latihan (2) kenaikan pangkat atau jabatan dan (3) perpindahan”. Sedangkan menurut Siagian (2001:85), pengembangan Sumber Daya Manusia

dilakukan melalui beberapa program sebagai berikut :

1. Pelatihan dalam jabatan.

Pelatihan dalam jabatan pada dasarnya berarti penggunaan tehnik pelatihan dimana para peserta dilatih langsung ditempatnya bekerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta latihan dalam mengerjakan tugasnya sekarang yang bertindak sebagai seorang pelatih bisa seorang pelatih formal, atasan langsung atau teman sekerjanya yang lebih senior dan lebih berpengalaman.

2. Rotasi pekerjaan.

Dalam teknis ini para pegawai dalam suatu instansi dilatih mengerjakan berbagai macam tugas, sehingga jika harus dialih tugaskan baik secara permanen maupun untuk sementara waktu pegawai pada umum tidak menghadapi kesukaran dalam penyesuaian dalam tugas barunya.

3. Sistem ceramah.

Penerapan sistem ceramah ini merupakan cara pelatihan yang paling tua namun juga paling populer. Ceramah dapat digunakan dengan berbagai variasi, misalnya tanpa tanya jawab, dengan tanya jawab, tanpa atau dengan alat peraga, set film, slide, ever head projector dan video.

4. Pelatihan vestibul.

Pelatihan ini merupakan metode untuk meningkatkan keterampilan terutama yang bersifat tehnikal ditempat pekerjaan, akan tetapi tanpa mengganggu kegiatan organisasi atau instansi sehari-hari. Biasanya instansi menyediakan lokasi tiruan yang mirip dengan keadaan sebenarnya dari instansi untuk meniru kegiatan-kegiatan yang biasanya langsung dalam instansi yang bersangkutan.

5. Role playing.

Cara ini sering digunakan apabila sasaran dari pelatihan menyangkut perilaku, terutama yang berwujud kemampuan menumbuhkan sikap empati dan melihat sesuatu dari kacamata orang lain. Caranya adalah dengan melibatkan peserta dalam permainan dimana peserta memainkan peranan pihak lain yang misalnya mempunyai kepentingan yang

seolah–olah bertolak belakang dengan kepentingan sendiri.

6. Studi kasus.

Pelatihan ini sering digunakan sebagai cara pelatihan para manajer atau calon manajer yang sasaran utamanya adalah kemampuan mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Peserta dilatih mempelajari problematika tertentu dan cara orang lain mengatasi masalah tersebut, sehingga peserta dilatih untuk menganalisis sendiri situasi itu dan mengambil keputusan tentang cara–cara terbaik untuk mengatasinya serta terlatih untuk menginterpretasikan data dan nalar yang dimilikinya.

7. Simulasi.

Cara ini menggunakan suatu alat mekanikal yang identik dengan alat yang digunakan oleh peserta dalam tugasnya. Misalnya, stimulator yang digunakan untuk melatih seorang penerbang.

8. Pelatihan laboratorium.

Pelatihan ini bertujuan untuk bertukar pengalaman, pemahaman, perasaan, perilaku, persepsi dan reaksi orang lain dalam berinteraksi dengan pekerjaannya, dengan mempergunakan cara pelatihan kepekaan dengan cara–cara lain yang sejenis.

9. Belajar sendiri.

Pelatihan dengan cara ini instansi mempersiapkan bahan pelajaran yang bentuknya bisa berupa buku pedoman, buku petunjuk, video atau disket yang mengandung bahan–bahan pelajaran yang dianggap penting untuk dikuasai oleh para pegawai. Jadi pegawai belajar sendiri, namun tetap dalam belajar yang terprogram.

Setelah mengetahui kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia secara umum, maka berikut ini akan dipaparkan tentang kegiatan yang dilaksanakan dalam pengembangan Sumber Daya guru SD. Menurut Supriadi (2003:533-538), pengembangan tersebut adalah :

a. Pengembangan sumber daya guru SD yang dilakukan secara teratur.

Melalui sistem gugus sekolah berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain dengan mengembangkan

sumber daya guru SD. Namun pada saat persoalan kualitatif (peningkatan kualitas) bergeser kearah kualitatif sekaligus kuantitatif (pemerataan mutu sekolah), maka tantangannya menjadi berbeda. Kualitas pendidikan di SD berkaitan dengan variabel-variabel lokasi geografis, makin jauh lokasi sekolah dari kota, makin rendah mutunya. Menjangkau sekolah satu demi satu secara serempak adalah pekerjaan yang memakan waktu, tenaga dan biaya. Karena itu, Dirjen Dikdasmen menetapkan pembentukan gugus sekolah di SD sebagai wahana pengembangan guru SD.

Suatu gugus meliputi komponen-komponen sebagai berikut :

1. SD Inti.

SD Inti adalah suatu SD yang terpilih diantara anggota gugus yang mempunyai peranan sebagai pusat pengembangan pada tingkat gugus. Secara kelembagaan, SD Inti memiliki dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan tenaga kependidikan yang menunjang upaya peningkatan mutu pendidikan di tingkat gugus tersebut.

2. SD Imbas.

SD Imbas adalah sekolah yang menjadi anggota suatu gugus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem gugus. Setiap upaya pembaharuan pendidikan yang dikembangkan melalui SD Inti akan ditularkan kepada SD Imbas. Pembaharuan yang dimaksud bisa berupa peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar, manajemen sekolah dan lain-lain.

3. Kelompok Kerja Guru (KKG).

Kelompok Kerja Guru merupakan wadah pengembangan sumber daya guru yang tergabung dalam sistem gugus dan anggotanya adalah semua guru dalam gugus yang bersangkutan. Secara profesional KKG dapat dibagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan jenjang kelas (misalnya kelompok guru kelas 1 dan seterusnya) dan

berdasarkan mata pelajaran (misalnya kelompok pelajaran matematika)

4. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)

KKKS merupakan wadah pembinaan kepala sekolah berkenaan dengan tugas–tugasnya dalam mengelola sekolah sebagai penggerak dalam peningkatan mutu pendidikan di tingkat sekolah maupun di tingkat gugus.

5. Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS).

Wadah ini secara organisatoris tidak berada dalam struktur gugus, namun secara fungsional peran dan fungsi pengawasan sangat penting dalam upaya pengembangan sumber daya guru dan kepala sekolah. KKPS berada pada tingkat kecamatan dan dibina secara langsung oleh kepala kantor cabang dinas pendidikan setempat.

6. Pusat Kegiatan Guru (PKG).

PKG adalah tempat KKG dan KKKS mengadakan kegiatan bersama yaitu rapat dan diskusi. Wadah ini merupakan bengkel kerja dan pusat belajar, tempat guru saling berbagi kemampuan dan pengalaman, berdiskusi bersama mengenai masalah–masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran di sekolah. PKG bertempat di SD Inti yang pengelolaannya dilakukan bersama oleh sekolah yang menjadi anggota gugus.

7. Guru Pemandu.

Keberadaan guru pemandu mata pelajaran dan tutor dalam sistem gugus dimaksudkan untuk membantu guru–guru dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas.

8. Tutor.

Berbeda dengan guru pemandu yang hanya menguasai mata pelajaran tertentu. Tutor menguasai semua mata pelajaran di SD dengan berbagai metodenya walaupun tingkat kedalaman

penguasaan mereka akan materi dan metodologi pelajaran mungkin berbeda-beda.

b. Pengembangan Sumber Daya Guru SD secara temporer melalui :

1. Rekrutmen Guru SD

Secara nasional (makro), kebutuhan akan guru telah mencukupi, namun apabila diamati dan dianalisis secara mikro, yaitu tingkat sekolah atau daerah, berbagai masalah muncul antara lain adalah terdapat daerah yang kelebihan guru mata pelajaran tertentu sementara daerah lain kekurangan. Karena pemerataan guru yang timpang tersebut dan banyaknya guru yang pensiun, maka setiap tahun tetap diperlukan pengangkatan guru-guru baru. Berkaitan dengan hal ini rekrutmen guru dilaksanakan secara nasional agar dapat diketahui peta ketersediaan guru menurut bidang studinya. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperoleh calon guru yang mempunyai pengetahuan luar dan potensial untuk dapat dikembangkan lebih lanjut dan agar standar mutu guru dapat terpelihara. Dengan sistem ini, guru yang berasal dari daerah yang surplus guru dapat diangkat dan ditempatkan di daerah lain yang minus guru.

2. Penataran.

Program penataran guru SD disusun bersama oleh SD yang mengirimkan peserta penataran dari pihak yang mengadakan penataran. Sebelum mengirimkan gurunya dalam penataran tersebut, pihak sekolah harus mengetahui tujuan dari diadakannya penataran itu secara pasti, sehingga para peserta penataran bisa lebih mempersiapkan diri dan memusatkan perhatiannya pada materi yang dibahas.

Penataran merupakan salah satu tehnik pengembangan sumber daya guru SD yang memiliki tujuan untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan keterampilan mengajar guru dalam menghadapi setiap perubahan kurikulum dan

perkembangan baru dalam bidang pendidikan.

Adapun contoh dari penataran untuk guru SD misalnya penataran supervisi pengajaran matematika untuk SD, penataran evaluasi IPS untuk SD, penataran media pengajaran IPA untuk SD dan lain-lain.

3. Mutasi Guru.

Sejalan dengan semangat reformasi, maka segala peraturan dan surat edaran yang berkaitan dengan mutasi guru perlu dikaji ulang. Berdasarkan masukan-masukan yang disusun, telah diusulkan butir-butir mengenai : (1) mutasi guru dari luar jawa ke pulau jawa, (2) alih tugas guru menjadi tenaga administrasi, (3) pemberian tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah, (4) alih tugas dari guru atau kepala sekolah menjadi pengawas sekolah.

4. Program Penyetaraan D-II Guru SD.

Program ini dilaksanakan melalui dua sistem, yaitu Sistem Belajar Jarak Jauh (SBJJ) dengan Universitas Terbuka (UT) dan sistem tatap muka kerja sama dengan lembaga perguruan tinggi keguruan negeri di seluruh Indonesia.

Proses pembelajaran dengan SBJJ dilaksanakan melalui kegiatan belajar mandiri baik secara perorangan maupun kelompok kecil dengan menggunakan modul dan bahan belajar lainnya di sertai kegiatan tutorial tatap muka dan tutorial jarak jauh sesuai kebutuhan. Di pihak lain, proses pembelajaran dalam sistem tatap muka diorganisasikan melalui interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa reguler secara terjadwal di kampus dan unit pengelola program selama tiga hari dalam satu minggu. Kelulusan peserta program dicapai setelah mereka menempuh dan lulus semua mata kuliah yang dibebankan dengan IPK minimal 2,00.

5. Seminar.

Salah satu dari program kerja yang diadakan oleh dinas

pendidikan pada tingkat kabupaten adalah mengadakan seminar, yang mana sasarannya adalah seluruh guru dan kepala sekolah di kabupaten setempat. Program kerja ini biasanya diadakan oleh setiap dinas pendidikan di tingkat kabupaten dan pihak cabang dinas pendidikan ditingkat kecamatan masih jarang atau tidak semua cabang dinas maupun memprakarsai sendiri kegiatan seminar.

6. Pendidikan dan Latihan (Diklat).

Penyelenggaraan program diklat guru kelas yang mengajar mata pelajaran tertentu di SD bertujuan untuk memenuhi kebutuhan guru suatu pelajaran tertentu bagi SD yang belum memiliki guru mata pelajaran tersebut tanpa merekrut guru baru, selain itu tujuannya untuk membekali guru dan memberikan hak atau kewenangannya mengajar kepada salah seorang guru kelas atau guru agama agar memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan dasar sesuai dengan tujuan yang secara akademis dapat dipertanggungjawabkan.

Setiap kegiatan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan tujuan diklat menurut Moekijan (1985:55) adalah :

1. Untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan lebih efektif.
2. Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional.
3. Untuk mengembangkan sikap sehingga menimbulkan kemampuan kerja sama dengan teman-teman pegawai dalam pihak manajemen.

Adapun kegiatan yang harus dilaksanakan sebelum melaksanakan diklat adalah :

- penyiapan modul,
- penyiapan video kaset

- simulasi program,
- rapat koordinasi program,
- rapat koordinasi ditempat tertentu,
- penataran instruktur pusat dan
- penyelenggaraan diklat secara mandiri.

C. KUALITAS PENDIDIKAN

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah usaha secara sadar dan terencana, sebagai suatu proses belajar mengajar yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan berfikir seseorang serta untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuannya. Dan diadakan pendidikan ini diharapkan akan dapat menghasilkan peserta didik yang mempunyai kemampuan berfikir yang tinggi dan mempunyai keterampilan yang baik guna terjun ke dunia kerja, namun juga untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tugas yang dihadapinya. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, didefinisikan bahwa : “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa negara”.

Kemudian dijelaskan pengertian pendidikan sebagai suatu proses interaksi dan interelasi antar komponen pendidikan dalam proses integral, menyeluruh dan mempunyai tujuan khusus yang ditetapkan (Wirojoedo, 1986:3). Berkaitan dengan hal ini Suryosubroto (1990:18) menguraikan empat macam tujuan pendidikan yang tingkatan dan luasnya berkaitan, yaitu :

a. Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan pendidikan nasional membangun kualitas manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dapat meningkatkan kebudayaan dengan-Nya sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila mempunyai semangat dan kesadaran tinggi, berbudi pekerti luhur dan berkepribadian kuat cerdas terampil dapat mengembangkan dan menyuburkan sikap demokrasi, dapat memelihara hubungan yang baik

antara sesama manusia dan dengan lingkungannya, sehat jasmani, maupun mengembangkan daya estetik berkesanggupan untuk membangun diri dan masyarakatnya.

b. Tujuan Institusional

Tujuan institusional adalah perumusan secara umum pola perilaku dan pola kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu lembaga pendidikan. Perumusan tujuan institusional untuk masing-masing lembaga pendidikan berbeda-beda, sesuai dengan fungsi dan tugas yang dipikul oleh masing-masing lembaga dalam rangka menghasilkan lulusan dengan kemampuan dan ketrampilan tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat dan negara. Dalam hal ini institusional dari SD dirumuskan sebagai berikut :

1. Supaya anak-anak tamatan SD memiliki pemahaman dan pengertian dasar mengenai kewajiban dan haknya sebagai manusia Pancasila dan berbuat selaras dengan pengetahuan dan pengertian itu.
2. Supaya anak-anak tamatan SD memiliki salah satu keterampilan atau kecakapan khusus yang merupakan bekal kehidupannya dalam masyarakat dan dengan demikian dapat berdiri sendiri dan menyumbangkan kecakapannya bagi pembinaan masyarakat adil dan makmur.
3. Supaya anak-anak tamatan SD memiliki dasar-dasar ilmu pengetahuan yang kokoh dan keprigelan penggunaannya untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah.

c. Tujuan Kurikuler

Setiap tujuan kurikuler ditentukan oleh tujuan institusional lembaga pendidikan masing-masing. Tujuan kurikuler sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk mencapai pola perilaku dan pola kemampuan serta keterampilan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu lembaga, yang sebenarnya merupakan tujuan institusional dari lembaga tersebut.

Melalui rumusan tujuan kurikuler dapat diketahui macam kemampuan dan keterampilan apa yang ingin diberikan pada siswa.

Namun dalam hal ini, rumusan tujuan kurikuler masih belum dinyatakan secara terperinci. Tujuan kurikuler ini berhubungan dengan tujuan dari masing-masing bidang studi yang diberikan pada siswa. Untuk tingkat SD, tujuan kurikuler diberlakukan untuk setiap kelas, dari mulai kelas I sampai dengan kelas VI.

d. Tujuan Instruksional

Tujuan instruksional adalah rumusan secara terperinci apa saja yang harus dikuasai oleh siswa atau anak didik sesudah ia melewati kegiatan intruksional yang bersangkutan dengan berhasil.

Pada hakekatnya pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia baik didalam maupun diluar sekolah. Usaha itu menurut Nawawi (1987:8) diselenggarakan dalam berbagai bentuk sebagai berikut :

1. Usaha pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja, berencana, terarah dan sistematis melalui suatu lembaga yang disebut "Pendidikan Formal".
2. Usaha pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja akan tetapi tidak berencana dan tidak sistematis dilingkungan keluarga disebut "Pendidikan Informal".
3. Usaha pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja dan berencana tetapi tidak sistematis diluar lingkugan keluarga dan lembaga pendidikan formal disebut "Pendidikan Informal".

Hal itu dijelaskan pula dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Sekolah yang disebutkan bahwa pendidikan ini dapat ditempuh melalui beberapa jalur dimana : "Pendidikan diselenggarakan pada jalur formal atau pendidikan sekolah, jalur pendidikan non formal atau jalur pendidikan luar sekolah, dan jalur pendidikan informal atau jalur pendidikan keluarga dan lingkungan".

2. Kualitas

Mendefinisikan kualitas tidaklah mudah karena pada dasarnya kualitas mencakup berbagai segi dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Kualitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka Jakarta : 1996) diartikan

sebagai berikut :

- a. Tingkat baik buruknya sesuatu ; kadar.
- b. Derajat atau taraf (kepribadian, kecakapan, dan sebagainya) ; mutu.

Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa suatu kualitas menuju pada tingkat baik buruknya sesuatu atau derajat dari sesuatu yang menyangkut benda atau orang.

Kualitas pendidikan bukanlah hal yang statis tetapi berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan hasil pendidikan yang selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kualitas pendidikan oleh Depdikbud (1996:8) didefinisikan sebagai “kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap kemampuan tersebut menurut norma atau standar yang berlaku”.

Nilai tambah ini dapat diketahui dari *input*, proses, *output* pendidikan. Jadi, kualitas pendidikan menunjukkan tingkat baik/buruknya *input*, proses dan keluaran/*output* dari pendidikan yang dalam hal ini khususnya pendidikan di lingkungan sekolah dalam memuaskan kebutuhan pendidikan yang ditentukan :

1. *Input* Pendidikan

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. *Input* sumber daya meliputi sumber daya manusia (kepala sekolah, guru, karyawan, peserta didik) dan sumber daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan dll). *Input* perangkat meliputi : (struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program dll). *Input* harapan berupa visi, misi, tujuan, dan saran-saran yang ingin dicapai sekolah.

Kesiapan *input* sangat diperlukan agar proses dapat

berlangsung dengan baik. Atau dengan kata lain, input merupakan prasyarat bagi berlangsungnya proses. Oleh karena itu, tinggi rendahnya *input* dapat diukur dari tingkat kesiapan *input*. Makin tinggi tingkat kesiapan *input*, makin tinggi kualitas *input* tersebut.

2. Proses Pendidikan

Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses tersebut *input*, sedang sesuatu dari hasil proses disebut *output*. Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat sekolah), proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibanding dengan proses-proses yang lain.

Mutu proses pendidikan menggejala pada dua segi, yakni mutu komponen dan mutu pengelolaannya. Kedua segi tersebut satu sama lain saling tergantung, walaupun komponen-komponennya baik, seperti tersedianya sarana dan prasarana serta biaya yang cukup jika tidak ditunjang dengan pengelolaan yang handal maka pencapaian tujuan tidak akan tercapai secara optimal. Demikain pula jika pengelolaan baik tetapi dalam kondisi serba kekurangan maka akan menyebabkan hasil yang minim.

Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasinya dan penyerasian serta pemanduan *input* sekolah dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Dalam hal ini peserta didik tidak hanya sekedar menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh

gurunya, akan tetapi pengetahuan tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang lebih penting lagi peserta didik tersebut mampu mengembangkan diri.

3. *Output* Pendidikan

Output Pendidikan merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektifitasnya, produktifitasnya, efesienalnya, inivasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya.

Khusus yang berkaitan dengan kualitas *output* sekolah, dapat dijelaskan bahwa *output* sekolah dikatakan bermutu tinggi jika prestasi peserta didik, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam : 1) hasil tes kemampuan akademik/prestasi akademik/academic achievement, berupa nilai ulangan umum, UAN, dan 2) prestasi dibidang lain/prestasi non akademik/non academic achievement, seperti prestasi olah raga, kesenian, keterampilan dan mengarang (Depdiknas, 2002:14).

3. **Komponen yang mempengaruhi kualitas pendidikan dasar**

Pendidikan dasar sebagai jenjang pendidikan harus dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia merupakan pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah dan memberikan bekal kemampuan dasar bagi peserta didik untuk hidup bermasyarakat. Oleh karena itu harus diupayakan peningkatan kualitasnya. Dengan demikian dalam menetapkan kebijakan peningkatan kualitas pendidikan yang harus diperhatikan adalah komponen-komponen yang membentuk dan mempengaruhi pendidikan itu sendiri.

Komponen yang harus diperhatikan untuk mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas, khususnya disekolah dasar menurut Depdikbud (1996:9) ada beberapa yakni :

- a. Siswa, meliputi : kemampuan, lingkungan, termasuk lingkungan sosial, ekonomi, budaya dan geografis, intelegensian, kepribadian, bakat dan minat.

- b. Guru, meliputi : kemampuan, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, beban mengajar, kondisi sosial ekonomi, motivasi kerja, komitmen terhadap tugas, disiplin dan kreatifitas.
- c. Kurikulum, meliputi : landasan program dan pengembangan, Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP), metode, sarana, tehnik penilaian.
- d. Sarana dan Prasarana Pendidikan, meliputi : alat peraga atau alat praktek, labotarium, perpustakaan, ruang keterampilan, ruang UKS, ruang olah raga atau serba guna, ruang kantor atau TU, ruang BP, gedung dan perabot.
- e. Pengelolaan Sekolah, meliputi : pengelolaan kelas, pengelolaan guru, pengelolaan siswa, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan tata tertib atau disiplin (kepala sekolah, guru dan siswa), kepemimpinan.
- f. Proses Belajar Mengajar, meliputi : penampilan guru, penguasaan materi, kegunaan metode belajar, pendayagunaan alat atau fasilitas pendidikan, penyelenggaraan proses belajar mengajar (PMB) termasuk evaluasi, pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.
- g. Pengelolaan Dana, meliputi : perencanaan anggaran atau dana sekolah, penggunaan dana, laporan pertanggung jawaban, pengawasan.
- h. Pembinaan Profesional dan Monitoring, meliputi : kepala sekolah sebagai supervisor disekolahnya, pengawas sekolah sebagai supervisor, pembina lainnya.
- i. Hubungan Sekolah Dengan Lingkungan, meliputi : hubungan sekolah dengan orang tua siswa, hubungan sekolah dengan instansi pemerintah, hubungan sekolah dengan dunia usaha dan tokoh masyarakat, hubungan sekolah dengan lembaga pendidikan lainnya.

Dari komponen-komponen diatas dapat dikelompok lagi menjadi tiga faktor yakni : Faktor Personal (siswa dengan tenaga kependidikan), Faktor Material (sarana dan prasarana), dan Faktor Operasional (proses belajar mengajar termasuk pengelolaan dan pembinaan).

Guru sebagai tenaga pendidik yang memberikan pengajaran dan pendidikan pada siswa disekolah merupakan komponen utama yang sangat berpengaruh.

Untuk itu dikatakan bahwa salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan, guru merupakan komponen Sumber Daya Manusia yang harus dibina dan dikembangkan terus-menerus (Sahertian, 2000:1)

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas sangat memerlukan tenaga pendidik atau sumber daya guru yang berkualitas pula. Sehingga bisa dikatakan bahwa upaya pembenahan kurikulum dan perbaikan sarana dan prasarana serta manajemen pendidikan sangat penting, tetapi tanpa guru yang berkualitas semua tidak ada maknanya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan sarana untuk memahami suatu permasalahan secara ilmiah dengan menggunakan metode tertentu yang dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar metode penelitian yang tepat dalam penelitian dapat menjamin keakuratan data dan hasil penelitian. Metode penelitian mengarahkan peneliti untuk mengikuti serta menginterpretasikan data sehingga dengan demikian maka tujuan penelitian dapat dicapai melalui prosedur yang sistematis dengan pembuktian-pembuktian yang meyakinkan.

Penelitian kualitatif menurut Moleong (1993:4-3) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

“latar ilmiah, manusia sebagai alat atau instrumen, metode kualitatif, analisa data secara induktif, teori dari dasar, deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain yang bersifat sementara dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama”

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini terdapat penetapan batasan yang didasarkan pada fokus yang timbul dalam masalah penelitian. Hal ini sangatlah penting dalam proses penelitian karena dapat membantu proses pelaksanaan penelitian sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah dan memperoleh hasil penelitian seperti yang diharapkan karena adanya kesesuaian antara penetapan fokus penelitian dengan tujuan penelitian.

Menurut Moleong (1993:237) “penentuan fokus penelitian akan membatasi studi sehingga penentuan tempat penelitian menjadi objek dan penentuan fokus yang tepat akan mempermudah menyaring informasi yang masuk”. Jadi ketajaman analisis penelitian dapat dipengaruhi oleh kemampuan kita dalam menentukan fokus penelitian yang tepat. Yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Implementasi kegiatan Peningkatan pengembangan SDM guru Sekolah Dasar di Kabupaten Banyuwangi, yang dapat dilihat dari :
 - a. Kegiatan yang dilakukan secara teratur dalam gugus sekolah, meliputi :
 - Sekolah dasar Inti dan Sekolah dasar Imbas
 - Kelompok Kerja Guru
 - Pusat Kegiatan Guru (PKG)
 - b. Kegiatan yang dilakukan secara temporer yang meliputi :
 - Penataran
 - Diklat
 - Seminar
2. Peningkatan kualitas pendidikan yang telah dicapai terkait pelaksanaan pengembangan SDM guru Sekolah Dasar di kabupaten Banyuwangi yang bisa dilihat dari :
 - a. Nilai rata-rata hasil evaluasi belajar siswa SD dalam Ujian Akhir Sekolah (UAS)
 - b. Tingkat kelulusan siswa SD yang mengikuti Ujian Akhir Sekolah (UAS)
2. Faktor pendukung dan penghambat Pengembangan Sumber Daya Guru Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian terhadap obyek yang akan diteliti, maka lokasi penelitian ini adalah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Pengertian dari situs itu sendiri adalah menunjukkan di mana sebenarnya peneliti dapat menangkap keadaan dari obyek yang akan diteliti, sehingga data yang akurat dan diperlukan dapat diperoleh. Maka situs penelitian ini adalah pada Subdin Tenaga Kependidikan serta Subdin TK/SD dan salah satu SD sebagai sampel yang berkaitan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

D. Sumber Data

Menurut Lofland & Lofland seperti yang dikutip Moleong (1993:112) “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan”, namun hal ini tidak berarti bahwa data-data tertulis seperti dokumen, laporan-laporan tidak penting. Hal ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif cenderung mengutamakan wawancara dan pengamatan langsung dalam memperoleh data. Data-data tertulis dapat membantu. Dalam penelitian kualitatif data-data tersebut merupakan data yang bersifat tambahan.

Sumber data berdasarkan jenisnya dibagi dalam dua jenis yaitu :

1. Data primer : merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pejabat yang terkait dengan kajian yang diteliti. Data ini diperoleh dari pegawai dinas Pendidikan yang terkait.
2. Data sekunder : merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek kajian yang diteliti namun diusahakan oleh pihak lain, yaitu dokumen dan laporan yang berkaitan dengan obyek kajian yang diteliti.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan tiga metode yang disesuaikan dengan jenis data. Sehingga data yang diperoleh bersifat obyektif dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara : merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.
2. Observasi : Adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan secara langsung ini peneliti lakukan mulai dari peneliti datang ke lokasi penelitian sampai dengan peneliti meninggalkan lokasi penelitian, yaitu pengamatan tentang kegiatan peningkatan Sumber Daya guru SD serta sarana dan prasarana yang

menunjang kegiatan tersebut pada Dinas Pendidikan dan beberapa SD Inti.

3. Dokumentasi : merupakan tehnik pengumpulan data melalui dokomen atau arsip pihak yang terkait dengan penelitian. Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (1993:161), "Dokumen digunakan dalam penelitian, karena sebagai sumber data ia bersifat stabil, dapat digunakan sebagai bukti dalam suatu pengajian, yang sifatnya alamiah sesuai dengan konteks".

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Adapun yang menjadi instrumen penelitian dalam hal ini adalah peneliti sebagai instrumen utama dibantu dengan instrumen tambahan yaitu pedoman wawancara serta perangkat penunjang lainnya seperti alat pencatatan dan sebagainya.

G. Analisa Data

Setelah pekerjaan di lapangan dari suatu penelitian selesai, maka kegiatan berikutnya adalah mengadakan analisa data, sehingga nantinya dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah atau mendapat jawaban atas permasalahan tersebut. Analisa data menurut Patton seperti yang dikutip Moleong (2002:103) adalah.

"proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar".

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (2002:103) mendefinisikan bahwa

"analisa data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu".

Data yang terkumpul dapat berguna dalam memecahkan masalah yang diteliti. Dan dari data yang telah terkumpul tersebut, peneliti berusaha untuk

menganalisis supaya bisa memperoleh arti serta makna yang terkandung. Adapun analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha menggambarkan secara sistematis tentang Pengembangan Sumber Daya Guru Sekolah Dasar Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan.

Analisis data kualitatif sebagaimana yang diungkapkan oleh Sanapiah Faizal (1999:256), terdiri dari 3 kegiatan yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan untuk merangkum, mengikhtiarkan atau menyeleksi data yang terekam dari hasil wawancara, observasi atau dari sejumlah dokumen yang masing-masing dimasukan ke dalam kategori tertentu.

2. Display data

Display data adalah penyajian data ke dalam sejumlah kategori yang sesuai yang akhirnya akan memudahkan dalam rangka menuturkan, menyimpulkan dan menginterpretasikan data. Selain itu display data juga berfungsi sebagai daftar yang bisa secar tepat menunjukkan cakupan data yang telah dikumpulkan.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam kegiatan ini peneliti dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan tertentu dari hasil pemahaman dan pengertiannya. Langkah-langkah selanjutnya adalah memberikan penafsiran atau interpretasi dari data yang telah diperoleh terutama data yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Interpretasi data ini langsung akan menggambarkan pandangan peneliti sesuai dengan pemahaman terhadap teori hasil perpustakaan yang relevan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data.

1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Banyuwangi :

a. Keadaan Geografis dan Fisik Dasar.

1. Keadaan Geografis.

Berdasarkan Perda Tingkat II Kabupaten Banyuwangi, Wilayahnya meliputi areal seluas 2.730 Ha, meliputi 24 kelurahan, 16 kelurahan kecamatan Banyuwangi, 6 kelurahan kecamatan Giri dan 2 kelurahan kecamatan Glagah.

Batas-batas kota Banyuwangi adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Giri
- Sebelah Timur : Selat Bali
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kabat
- Sebelah Barat : Kecamatan Glagah

2. Keadaan Fisik Dasar.

Berdasarkan letak tempat permukaan bumi, kota Banyuwangi terletak pada ketinggian antara 0 meter sampai 100 meter diatas permukaan laut, untuk daerah yang beriklim tropis khususnya di kabupaten Banyuwangi perubahan suhu udara tidak ditentukan oleh perubahan iklim, tetapi ditentukan oleh perbedaan tinggi dari permukaan laut.

Perbedaan tinggi dari permukaan laut turut menentukan terhadap jenis kegiatan penduduk, disamping itu turut menentukan pula perkembangan fisik suatu wilayah. Bila dikaitkan dengan kondisi fisik kota Banyuwangi yang relatif datar maka kota Banyuwangi dapat berkembang ke semua arah, terutama pada saat ini kota Banyuwangi berkembang kearah utara dan selatan serta barat.

b. Pola Penggunaan Lahan.

1. Penggunaan Lahan.

Kondisi penggunaan lahan di wilayah perencanaan kota Banyuwangi pada tahun 1991 masih didominasi oleh penggunaan non built up area (wilayah belum

terbangun) sebesar 2.154,51 Ha atau 79,21%, sedangkan wilayah terbangun (built up area) sebesar 565,49 Ha atau 20,79% dengan perincian di tabel 1. sebagai berikut :

Tabel 1. Penggunaan Lahan di Wilayah Perencanaan Kota Banyuwangi

No	Jenis Penggunaan lahan	Luas	Persentase
1	Wilayah terbangun (built up area)	565,49 Ha	20,79 %
2	Sawah	737,20 Ha	27,10 %
3	Perkebunan	50,81 Ha	1,87 %
4	Ladang/tegalan	867,43 Ha	31,89 %
5	Empang/kolam/tebat/tambak	83,65 Ha	3,08 %
6	Kuburan/makam	18,92 Ha	0,70 %
7	Jalan	16,91 Ha	0,62 %
8	Lain-lain	379,59 Ha	13,96 %

Sumber : Dokumen Pengumpulan dan pengolahan data Kabupaten Banyuwangi

Dari perincian tabel 1. diatas bisa diketahui bahwa luas kota keseluruhan kota Banyuwangi adalah sebesar 2.720 Ha. Untuk tiap-tiap jenis penggunaan lahan, penggunaan lahan perumahan dan pekarangan berkisar berada di kelurahan Klatak (176,52 Ha) dan terkecil berada di kelurahan Bakungan (0,39 Ha), untuk penggunaan lahan sawah terbesar berada di kelurahan Pakis (137,50 Ha) dan yang terkecil berada di kelurahan Lateng (1,97 Ha) sedangkan kelurahan yang tidak terdapat sawah adalah kelurahan Kepatihan, Panderejo, Temenggungan, Kampung Melayu dan Kampung Mandar. Untuk penggunaan lahan ladang/tegalan terbesar berada di kelurahan Klatak (230,04 Ha) dan yang terkecil adalah kelurahan Boyolangu (1,36 Ha). Untuk penggunaan lahan perkebunan hanya terdapat dua kelurahan yaitu kelurahan Kalipuro (46,71 Ha) dan kelurahan Banjarsari (4,10 Ha).

2. Intensitas Penggunaan Lahan.

Intensitas penggunaan lahan di kota Banyuwangi saat ini bisa dilihat dari angka banding lantai dasar dan angka banding lantai bangunan, sedangkan untuk kondisi serta luasan dari tiap-tiap jenis penggunaan lahan yang ada akan diterangkan dalam bahasan berikut.

Angka banding lantai dasar bangunan di kota Banyuwangi pada kawasan pusat kota berkisar antara 60% - 100% untuk kawasan trasisi/pinggiran kota

berkisar antara 30% - 75%. Pada kawasan pusat kota angka banding tersebut lebih besar karena intensitas penggunaan lahan yang semakin besar dengan terkonsentrasinya fasilitas-fasilitas kegiatan yang utama pada kawasan pusat kota tersebut. Angka banding lantai bangunan di kota Banyuwangi dilihat dari Tabel 2. setiap jenis penggunaan lahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Angka Banding Lantai Bangunan di Kota Banyuwangi.

No	Jenis Penggunaan lahan	Angka Banding
1	Pendidikan	60% - 75 %
2	Perkantoran	60% - 80 %
3	Kesehatan	50% - 75 %
4	Perumahan	30% - 100 %
5	Peribadatan	40% - 85 %
6	Industri	60% - 75 %
7	Perdagangan	75% - 90 %

Sumber : Dokumen Pengumpulan dan pengolahan data Kabupaten Banyuwang.

Kondisi bangunan yang ada di kota Banyuwangi pada umumnya dalam kondisi sedang sampai baik, kecuali pada kawasan timur kota yaitu di kelurahan kampung Mandar dan bangunan yang ada di sebelah kanan dan kiri sungai di kelurahan Pengantigan dalam kondisi buruk. Dapat dilihat pada tabel 3. berikut ini

Tabel 3. Kondisi Bangunan di Kota Banyuwangi.

No	Jenis Penggunaan lahan	Kondisi Bangunan
1	Pendidikan	Sedang – Baik
2	Perkantoran	Sedang – Baik
3	Kesehatan	Sedang – Baik
4	Perumahan	Buruk – Baik
5	Peribadatan	Sedang – Baik
6	Industri	Buruk – Sedang
7	Perdagangan	Buruk – Baik

Sumber : Dokumen Pengumpulan dan pengolahan data Kabupaten Banyuwangi

c. Fasilitas Pendidikan.

Fasilitas pendidikan yang ada tersebar pada tiap kelurahan di kota Banyuwangi pada tahun 1991 jumlah fasilitas pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak 44 unit dengan prosentase terbanyak terdapat di kelurahan Penganjuran sebanyak 18,181% dari seluruh jumlah Taman Kanak-kanak di kota Banyuwangi, tingkat Sekolah dasar 84 unit dengan prosentase terbanyak terdapat di kelurahan Penganjuran sebanyak 12,676% dari seluruh jumlah Sekolah Dasar di kota Banyuwangi, tingkat SLTP 28 unit dengan prosentase terbanyak terdapat di kelurahan Penganjuran sebanyak 25% dari seluruh jumlah SLTP di kota Banyuwangi, tingkat SLTA 22 unit dengan prosentase terbanyak terdapat di kelurahan Penganjuran sebanyak 36,365% dari seluruh jumlah SLTA di kota Banyuwangi dan Perguruan Tinggi atau setingkat Akademik sebanyak 5 unit dengan prosentase terbanyak terdapat di kelurahan Penganjuran sebanyak 60% dari seluruh Perguruan Tinggi atau setingkat Akademik di kota Banyuwangi.

d. Fasilitas Kesehatan.

Fasilitas kesehatan di wilayah kota Banyuwangi dari data sekunder yang telah didapat adalah Rumah Sakit terdapat sebanyak 3 unit, Poliklinik terdapat sebanyak 38 unit, Puskesmas 15 unit, Posyandu 102 unit, sedangkan untuk tenaga medis terdapat dokter sebanyak 23 orang, bidan terdapat 35 orang, dan mantri kesehatan 40 orang.

e. Fasilitas Perdagangan.

Fasilitas perdagangan di Kota Banyuwangi pada tahun 1999 yang ada berupa pasar umum 8 unit dengan prosentase terbanyak terdapat di kelurahan Kepatihan sebanyak 25,000% dari seluruh jumlah Pasar Umum di kota Banyuwangi, 1 unit pasar hewan yang hanya terdapat di kelurahan Sobo, jumlah toko di kota Banyuwangi 918 buah dengan prosentase terbanyak terdapat di kelurahan Kepatihan 23,312 %, dan warung?kios 686 buah yang tersebar pada beberapa bagian wilayah kota dengan prosentase terdapat terbanyak di kelurahan Kepatihan 28,134% dari seluruh jumlah warung/kios di kota Banyuwangi. Sedangkan fasilitas lain sebagai penunjang antara lain 22 unit Bank, 84 unit gudang, 1 unit pasar ikan.

f. Fasilitas Olah Raga dan Rekreasi;

Fasilitas rekreasi dan olah raga di kota Banyuwangi yang dapat difungsikan untuk kegiatan olah raga dan rekreasi baik berupa gedung olah raga, gedung pertunjukan maupun taman rekreasi masih belum memadai, sehingga perlu diciptakan dan dikembangkan fasilitas olah raga dan rekreasi disesuaikan dengan kondisi kota dan tingkat kebutuhannya.

Sampai saat ini setelah dilakukan pengambilan data fasilitas olah raga dan rekreasi yang ada berupa bioskop sebanyak 2 buah, gedung pertunjukan 5 buah, gedung olah raga tertutup 4 buah, lapangan olah raga terbuka 51 buah dan taman sebanyak 5 buah.

2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi.

a. Kepemimpinan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, setelah otonomi daerah Kepala Dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dibangun di atas sebidang tanah seluas kurang lebih 5.000 meter persegi, otonomi daerah pada tahun 2001 mengalami tiga kali pergantian pimpinan, yang pertama Bapak H. AD. Suffandi Zachri, SH. Dan yang kedua digantikan Bapak Drs. H. Nurhadi, M.M dan yang terakhir digantikan Bapak Drs. Sulhiyono, MPD. Pada saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mempunyai pegawai 9.835 orang terdiri dari 221 tenaga staf, 820 tenaga guru, dan 132 kelompok jabatan fungsional.

b. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

1. Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

Penetapan visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi berikutnya. Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya keterpaksaan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi. Dengan demikian visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipasif, dan

inovatif sehingga memiliki gambaran yang menantang tentang masa depan yang diinginkan oleh instansi. Oleh karena itu visi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi adalah “terwujudnya masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang beriman dan bertaqwa, berbudi pekerti luhur, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, sehat dan mandiri serta berwawasan kebangsaan”.

2. Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Setiap instansi pemerintah harus memastikan agar visi masa depan selaras dengan perubahan yang harus dilakukan, sehingga organisasi akan dapat efektif dalam mencapai misi. Visi dan misi akan mendorong alokasi sumber daya di seluruh unsur organisasi sehingga setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas.

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai sehingga pernyataan misi akan membawa organisasi kepada dan bagaimana melaksanakannya. Misi diharapkan akan dapat menunjukkan peran dan program-program Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu tercetusnya misi Dinas Pendidikan Banyuwangi merupakan penjabaran dari visi yang telah dipedomi.

Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatkan perluasan dan mutu pendidikan.
3. Mewujudkan otonomi pendidikan dengan mengembangkan sistem manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.
4. Menumbuh kembangkan minat baca dan gemar belajar pada warga masyarakat.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pendidikan.

c. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

1. Kedudukan

Dinas pendidikan Kabupaten Banyuwangi adalah unsur pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang

pendidikan dalam wilayah kabupaten dan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok Dinas Pendidikan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintah Kabupaten di bidang pendidikan, meliputi kegiatan Bina program, Ketenagaan, Diklamen, Kesenian dan lain-lain.

3. Fungsi Dinas Pendidikan

Dinas pendidikan mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program kebijakan teknis pendidikan.
2. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis pendidikan.
3. Pemberdayaan potensi bidang pendidikan.
4. Pengawasan, pemantauandan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok.
5. Pelaksanaan ketatausahaan dinas.
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

d. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Untuk menjalankan tugas di bidang pendidikan, sangat diperlukan susunan organisasi untuk mempermudah pembagian kerja dan koordinasi antar bagian organisasi. Di mana susuan tersebut terdiri dari : (1). Kepala Dinas; (2). Bagian tata Usaha; (3). Sub Dinas Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar; (4). Sub Dinas Pendidikan Menengah; (5). Sub Dinas Diskluspورا; (6). Sub Dinas Sarana dan Prasarana; (7). Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian; (8). Kelompok Jabatan Fungsional; (9). Cabang Dinas; (10). Unit Pelaksana Teknis Dinas Bagian dan masing-masing Sub Dinas dipimpin seorang Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Stuktur Dinas pendidikan Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada bagan 1. dibawah ini.

3. Gambaran Umum SD di Kabupaten Banyuwangi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mempunyai sasaran yang diusahakan untuk dapat dicapai secara maksimal. Sasaran yang dimaksud dalam hal ini antara lain adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar. Berbagai sarana dan prasarana berusaha untuk dipenuhi dan disediakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, dan merupakan hal yang paling penting dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dapat dilihat dari lembaga SD yang tersedia di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu untuk dapat mewujudkan kegiatan belajar mengajar dalam pendidikan dasar, maka dibangun gedung-gedung SD yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Adapun jumlah gedung atau lembaga SD yang ada di Kabupaten Banyuwangi tersebut dapat dilihat tabel 4. sebagai berikut :

Tabel 4 : Jumlah SD di Kabupaten Banyuwangi

No	Kecamatan	SEKOLAH DASAR			M.IBTIDA'YAH			Jml
		Negeri	Swasta	Jml	Negeri	Swasta	Jml	
1	PESANGGARAN	38	0	38	0	3	3	41
2	BANGOREJO	32	0	32	0	12	12	44
3	PURWOHARJO	33	5	38	0	12	12	50
4	TEGALDLIMO	34	2	36	0	15	15	51
5	MUNCAR	51	3	54	0	15	15	69
6	CLURING	43	0	43	0	15	15	58
7	GAMBIAN	31	1	32	1	6	7	39
8	GLENMORE	46	2	48	0	8	8	56
9	KALIBARU	34	0	34	0	4	4	38
10	GENTENG	36	5	41	0	6	6	47
11	SRONO	45	0	45	0	19	19	64
12	ROBGOJAMPI	48	1	49	0	7	7	56
13	KABAT	42	0	42	0	18	18	60
14	SINGOJURUH	31	0	31	0	3	3	34
15	SEMPU	35	0	35	0	12	12	47
16	SONGGON	32	0	32	1	8	9	41
17	GLAGAH	19	0	19	0	2	2	21
18	BANYUWANGI	41	6	47	1	5	6	53
19	GIRI	15	3	18	0	4	4	22
20	KALIPURO	27	0	27	0	14	14	41
21	WONGSOREJO	36	0	36	0	14	14	50
22	SILIRAGUNG	30	0	30	0	8	8	38
23	TEGALSARI	26	2	28	0	9	9	37
24	LICIN	24	0	24	0	4	4	28
Jumlah		829	30	859	3	223	226	1085

Sumber : Dokumen Pengumpulan dan pengolahan data Kabupaten Banyuwangi

Dengan melihat tabel 4. diatas, di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2007 terdapat lembaga SD sebanyak 859 yaitu lembaga SD Negeri sebanyak 829 dan lembaga SD Swasta sebanyak 30. Sedangkan untuk Madrasah Ibtida'iyah sendiri 226, Madrasah ibtida'iyah Negeri sebanyak 3 dan Swasta 223. Jumlah terendah dari SD Negeri tersebut sebanyak 15 SD yang terdapat di kecamatan Giri dan jumlah tertinggi sebanyak 51 SD di kecamatan Muncar. Sedangkan untuk SD Swasta sendiri jumlah SD yang tertinggi terdapat pada kecamatan Banyuwangi yaitu sebanyak 6 SD. Pada Madrasah Ibtida'iyah Negeri di setiap kecamatan sebagian belum ada hanya beberapa kecamatan yang mendirikan Mandrasah Ibtida'iyah seperti misalnya, kecamatan Gambiran sebanyak 1 Madrasah Ibtida'iyah, kecamatan Songgon 1 dan yang terakhir kecamatan Banyuwangi terdapat 1 Madrasah Ibtida'iyah Negeri. Sedangkan untuk Madrasah Ibtida'iyah Swasta jumlah terendah terdapat pada kecamatan Glagah yaitu sebanyak 2 Madrasah Ibtida'iyah dan jumlah tertinggi sebanyak 19 Mandrasah Ibtida'iyah terdapat pada kecamatan Srono. Itulah gambaran tentang data lembaga Sekolah Dasar maupun Madrasah Ibtida'iyah Negeri-Swasta yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

B. Data Fokus Penelitian

1. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Guru Sekolah Dasar di kabupaten Banyuwangi.

a. Kegiatan yang dilakukan secara teratur melalui sistem gugus Sekolah Dasar.

Dinas Pendidikan kabupaten Banyuwangi mengupayakan berbagai kegiatan untuk mengembangkan sumber daya guru SD yang diantaranya adalah memperlakukan sistem gugus sekolah dalam hal ini gugus sekolah dasar. Gugus sekolah dasar adalah gabungan dari 3 sampai 8 Sekolah Dasar yang memiliki tujuan dan semangat untuk maju bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan sumber daya guru sekolah dasar. Sebuah gugus terdiri dari satu SD inti dan beberapa SD imbas. Sedangkan tujuan pembentukan gugus sekolah adalah sebagai fasilitas peningkatan kemampuan dan keterampilan Guru SD yang pada gilirannya akan memacu peningkatan kualitas dan hasil belajar siswa.

Seperti hal senada yang disampaikan oleh Ibu Dra.Hj.Suhernik, Mpd bahwa kegiatan yang dilakukan secara teratur dilakukan melalui sistem gugus sekolah, kegiatan ini dilakukan setiap hari sabtu tiap minggunya.

Untuk memudahkan pengorganisasian sekolah, maka pembentukan gugus pada suatu wilayah didasarkan pada kriteria antara lain :

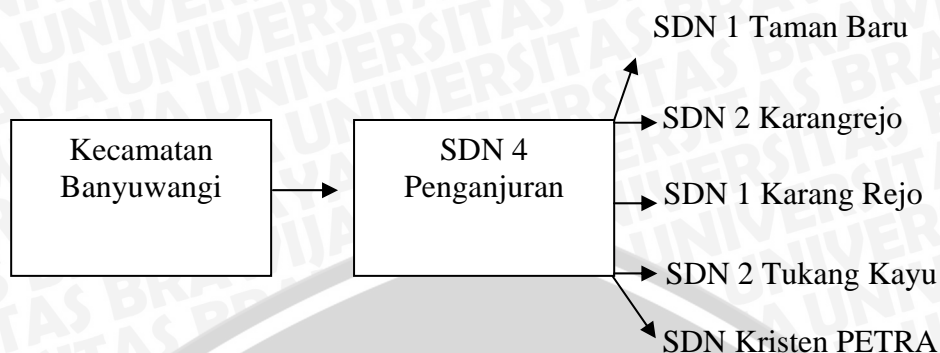
- 1) SD-SD yang dikelompokkan dalam satu gugus yang letaknya berdekatan.
- 2) Jumlah anggota terdiri atas 3 sampai dengan 8 SD dan dimungkinkan kurang dari atau lebih dari jumlah tersebut apabila antara SD yang satu dengan yang lainnya berjauhan.
- 3) Komunikasi antara SD yang satu dengan yang lain mudah dilakukan.
- 4) SD inti terletak antara SD-SD lain yang menjadi anggota gugus, sehingga para gurunya mudah berkunjung ke SD inti.
- 5) SD inti dipilih dari SD Negeri yang memiliki kelebihan diantara SD anggota gugus.
- 6) Pada setiap gugus (SD inti) dibentuk Kelompok Kerja Guru (KKG).

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara teratur dalam gugus Sekolah Dasar yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi tersebut meliputi :

1. Pembentukan SD inti dan SD imbas

Menurut Ibu Dra.Hj.Suhernik, Mpd mengenai intinya SD inti dan SD imbas, yaitu: "Pembentukan SD inti dan SD imbas ini sangat penting karena apabila ada permasalahan yang terdapat pada proses pengajaran disuatu SD, maka masalah tersebut dapat dibahas di SD inti yang disitu terdapat beberapa SD imbas, melalui kegiatan yang telah dilakukan". (wawancara tgl 8 November 2007 pukul 09.00 WIB).

Dalam kaitannya dengan pentingnya pembentukan gugus sekolah dasar, maka telah dibentuk SD inti yang merupakan pusat dari kegiatan gugus, seperti halnya yang terdapat pada Gugus sekolah 06 Kecamatan Banyuwangi yang dapat dilihat pada bagan 2. berikut ini:



Sumber : Dokumen gugus 06 SDN 4 Penganjuran Kecamatan Banyuwangi

Hal ini dipertegas lagi oleh pernyataan Ibu Dra.Hj.Suhermik, Mpd, selaku kepala sekolah SDN 4 Penganjuran yaitu “Bahwa SDN 4 Penganjuran dijadikan SD inti karena mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap dan jarak yang strategis antara SD-SD imbas”.

(wawancara pada hari Kamis tgl 8 November 2007 pukul 09.00 WIB).

2. Kelompok Kerja Guru (KKG)

Dalam setiap gugus SD diadakan kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk mengembangkan kemampuan guru melalui berbagai cara. Kegiatan tersebut antara lain adalah melalui Kelompok Kerja Guru (KKG). Melalui Kelompok Kerja Guru, para guru SD mengadakan pertemuan rutin yang berada pada masing-masing SD inti. Dengan begitu para guru yang unit kerjanya berada di SD imbas maka mereka berkumpul disalah satu SD yang ditunjuk sebagai pusat kegiatan dalam gugus yang disebut SD inti. Dalam pertemuan KKG, para guru SD dapat saling bertukar pikiran mengenai masalah mereka dalam mengajar di sekolah.

Menurut Ibu Dra.Hj.Suhermik, Mpd “Kegiatan yang dilakukan secara teratur dilakukan melalui sistem gugus sekolah, kegiatan ini dilakukan setiap hari Sabtu tiap minggunya” (wawancara tgl 8 November 2007, pukul 09.15 WIB).

Susunan Pengurus Gugus Sekolah 06 (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) Kecamatan Banyuwangi.

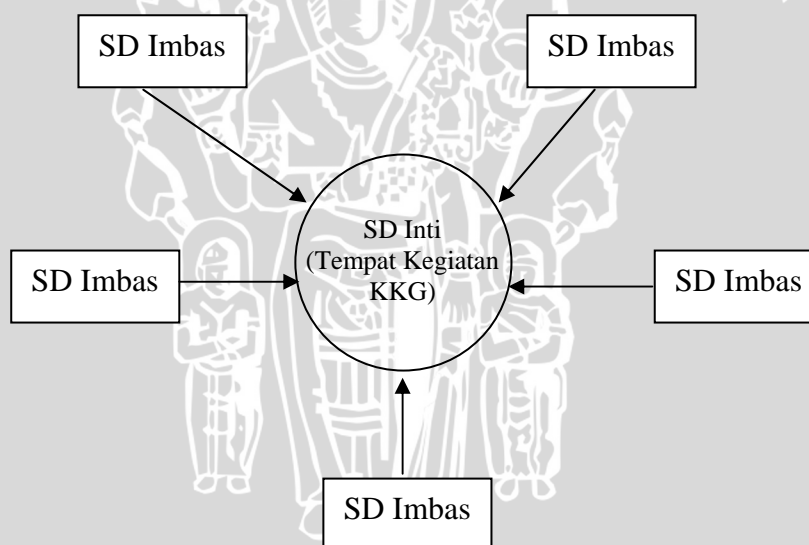
1. Ketua : Siti Sumarni
2. Sekretaris : Dra. Cipta Ningsih
3. Bendahara : Sri Hastuti, Spd
4. Anggota : Dra.Hj.Suhermik, Mpd

Suhaili
Imam Sujono, Spd
Endang Purwitati

Susunan Pengurus KKG Gugus Sekolah 06 Kecamatan Banyuwangi.

1. Penasehat : Pengawas TK/SD Wilayah Gugus 06
Kecamatan Banyuwangi
2. Pembina : Dra.Hj.Suhernik, Mpd (Ketua Gusah)
3. Ketua I : Anis Laswaningrum, Spd
Ketua II : Farida (SDN 2 Tukangkayu)
4. Sekretaris : Lilik Sunarsih
5. Bendahara : Olok Sujiami, Spd

Untuk lebih jelasnya, tempat pelaksanaan dan peserta KKG dapat dilihat pada bagan 3. berikut ini.



Sumber : Gugus 06 SDN 4 Penganjuran Kecamatan Banyuwang.

Kegiatan KKG dilaksanakan setiap seminggu sekali dan bertempat di SD inti. Para guru tersebut membicarakan berbagai hal mengenai masalah-masalah yang mereka hadapi. Adapun untuk mengetahui tentang hari apa serta apa saja kegiatan yang dilakukan secara umum dalam KKG dapat dilihat dalam tabel 5. sebagai berikut ini:

Apabila masalah atau kesulitan yang dialami para guru tidak bisa dicari solusinya dalam KKG, maka masalah tersebut dibahas pada Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Pengurus Sekolah (KKPS).

Dari observasi yang pernah peneliti lakukan memang apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan apa yang dijadwalkan walaupun masih ada kegiatan yang belum sepenuhnya dilaksanakan karena keterbatasan biaya.

3. Pusat Kegiatan Guru SD (PKG SD)

Menurut Bpk Ahmad Khoirullah, selaku kasie kurikulum TK/SD Kabupaten Banyuwangi. "Pusat Kegiatan Guru adalah wadah dimana KKG diadakan yang didalamnya membahas rapat dan diskusi yang bertempat di SD inti yang pengelolaannya dilakukan bersama oleh sekolah yang menjadi anggota gugus. Jadi pendanaan kegiatan tersebut dilakukan secara swadaya sesama guru antar SD" (wawancara tgl 9 November 2007 pukul 09.00 WIB).

Pusat Kegiatan Guru SD merupakan pusat pembinaan guru SD yang berada di SD inti dalam lingkungan sekolah yang dilengkapi dengan sumber belajar untuk melakukan inovasi dan mengatasi masalah yang ditemukan dalam kegiatan belajar mengajar.

PKG adalah tempat KKG dan KKKS mengadakan kegiatan bersama yaitu rapat dan diskusi. Wadah ini merupakan bengkel kerja dan pusat belajar, tempat guru saling berbagi kemampuan dan pengalaman, berdiskusi bersama mengenai masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran di sekolah. PKG bertempat di SD inti yang pengelolaannya dilakukan bersama oleh sekolah yang menjadi anggota gugus.

Hal senada seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dra.Hj.Suhernik, Mpd: "Pusat Kegiatan Guru yang ada di Gugus Sekolah 06 yang bertempat di SDN 4 Penganjuran, pengelolaannya dilakukan bersama oleh sekolah yang menjadi anggota gugus, dan didalam PKG Gugus Sekolah 06 ini sudah ada pengelompokan pembahasan yang akan memudahkan para guru untuk memecahkan suatu masalah yang tengah dihadapi".(wawancara pada hari Kamis 8 November 2007 pukul 09.00 WIB di ruang kepala sekolah).

b. Kegiatan yang dilakukan secara temporer meliputi:

1. Pendidikan dan Latihan (diklat)

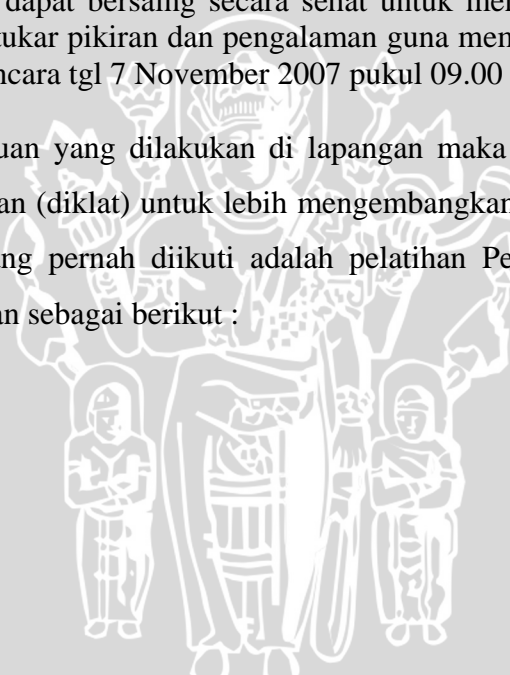
Menurut Effendi (1995:13) mengemukakan bahwa dalam teori pemecahan masalah para pelaku pembangunan dituntut untuk menyelesaikan masalah

pembangunan secara tepat sekaligus menjadikan pelaku ini sebagai sumber efektifitas pembangunan dengan cara meningkatkan kemampuan berpikir, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dan latihan secara penguasaan informasi dan kemampuan memilih informasi yang dibutuhkan pembangunan.

Kegiatan pengembangan sumber daya guru SD antara lain melalui kegiatan diklat yang diadakan para guru SD yang ditunjuk dari beberapa SD diseluruh kecamatan yang ada. Tujuan dari diselenggarakannya diklat adalah untuk menyampaikan gagasan pembaharuan dan meningkatkan kompetensi guru SD dalam bidang tertentu.

Senada dengan hal itu menurut Ahmad Khoirullah selaku kasie kurikulum TK/SD. “Diklat yang diadakan di Kabupaten Banyuwangi ini sangat baik dan bermanfaat bagi guru karena dengan diklat guru dapat menyampaikan uneg-uneg mereka dan para guru dapat bersaing secara sehat untuk meningkatkan kualitas mereka serta dapat bertukar pikiran dan pengalaman guna memperoleh hasil yang lebih baik lagi”.(wawancara tgl 7 November 2007 pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan temuan yang dilakukan di lapangan maka sangat dibutuhkan pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk lebih mengembangkan sumber daya guru SD. Adapun diklat yang pernah diikuti adalah pelatihan Pembelajaran Pakem dengan tabel 6. kegiatan sebagai berikut :



**Tabel 6. Jadwal Pelatihan Pakem (Pembelajaran Siswa Aktif Kreatif dan Menyenangkan) III Kabupaten Banyuwangi
Jadwal Pelatihan Pakem III Kabupaten Banyuwangi
Tanggal 2-5 Agustus 2005**

Waktu	Kegiatan	Uraian
Hari 1 Selasa, 2 Agustus 2005		
07.30 – 08.00	Pembukaan	Sambutan dan Pendahuluan Pelatihan
08.00 – 09.00	Unit 1	Jurnal belajar: Pengembangan Praktif Refleksi (Siswa diharapkan dapat mengeluarkan pendapat nya secara spontan dan aktif dalam segala hal pembelajaran baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah)
09.00 – 10.30	Unit 2	Kurikulum Berbasis Kompetensi
10.30 – 10.45		Istirahat
10.45 – 12.00	Unit 3	Pemetaan kurikulum
12.00 – 13.00		Ishoma
13.00 – 16.00	Unit 3	Pemetaan kurikulum (Lanjutan) dan Jurnal Belajar
Hari 2 rabu, 3 Agustus 2005		
07.30 – 10.00	Unit 4	Materi khusus Mata Pelajaran
10.00 – 10.15		Istirahat
10.15 – 12.00	Unit 4	Materi khusus Mata Pelajaran (lanjutan)
12.00 – 13.00		Ishoma
13.00 – 16.00	Unit 4	Materi khusus Mata Pelajaran (lanjutan) dan jurnal Belajar
Hari 3 Kamis, 4 Agustus 2005		
07.30 – 10.00	Unit 5	Perencanaan berdasarkan KBK
10.00 – 10.15		Istirahat
10.15 – 12.00	Unit 5	Perencanaan berdasarkan KBK (lanjutan)
12.00 – 13.00		Ishoma
13.00 – 16.00	Unit 6	Asemen dan Evaluasi serta Jurnal Belajar
Hari 4 jum'at, 5 Agustus 2005		
07.30 – 08.30	Ekspo	Kunjungan Hasil Pelatihan Mata Pelajaran
08.30 – 10.30	Unit 7	Perencanaan Berdasarkan KBK (lanjutan)
10.30 – 11.00		Penutup

Sumber : Dokumen Gugus 06 SDN 4 Penganjuran.

2. Penataran

Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, para guru SD seringkali menghadapi masalah seputar mata pelajaran yang mereka ajarkan. Untuk itu mereka membutuhkan pendalaman dalam bidang studi yang diajarkannya tersebut. Supaya mereka lebih bisa menguasai bidang studinya.

Hal ini seperti disampaikan oleh Ibu Dra.Hj.Suhernik, Mpd selaku Kepala Sekolah SDN 4 Penganjuran yaitu bahwa: “Biasanya penataran yang diikuti guru-guru SD membahas masalah seputar mata pelajaran yang mereka ajarkan, dimana

para guru SD merasa kesulitan menguasai pelajaran yang mereka ajarkan, tetapi tidak menutup kemungkinan para guru membahas tentang bagaimana cara mengatasi para siswanya yang bermasalah, dan kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan pada minggu ke empat”. (wawancara tgl 9 November 2007 pukul 08.00 WIB).

Para guru SD yang telah mengikuti penataran biasanya mereka menukarkan atau membagi pengetahuan yang didapatnya dari hasil penataran tersebut. Adapun penukaran hasil penataran tersebut biasanya ditukarkan melalui kegiatan KKG.

3. Seminar

Pelaksanaan seminar untuk guru SD di Kabupaten Banyuwangi diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, sedangkan dari pihak Cabang Dinas Pendidikan tingkat kecamatan menyelenggarakan kegiatan tersebut seperti halnya dalam peraturan guru yang mengikuti seminar di tingkat Kabupaten Banyuwangi tersebut dibentuk dari beberapa SD saja sehingga mereka mewakili guru-guru yang lain dari kecamatannya.

Menurut Bapak Ahmad Khoirullah, M.M selaku kasi Kurikulum TK/SD “ Seminar yang ada di kabupaten Banyuwangi biasanya diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten, sedangkan dari pihak cabang dinas pendidikan di tingkat kecamatan seminar ini bertujuan untuk membahas masalah-masalah yang baru dan hangat dibicarakan saat ini. Tapi kegiatan seminar ini masih dilaksanakan di tingkat kabupaten saja, karena anggaran yang ada di kecamatan belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut, walaupun ada yang melaksanakan kegiatan tersebut dan walaupun ada yang melaksanakannya di tingkat kecamatan itupun biaya dari swadaya guru itu sendiri” (Wawancara tanggal 9 November 2007 pukul 09.30 WIB).

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan yang dicapai di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dari:

a. Nilai rata-rata Ujian Akhir Sekolah (UAS)

Kualitas pendidikan yang dapat dicapai oleh masing-masing daerah tidak sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Kualitas pendidikan ini bisa diukur dengan melihat prestasi siswa melalui nilai hasil evaluasi yang dilaksanakan.

Dalam hal ini untuk mengetahui peningkatan kualitas pendidikan SD di Kabupaten Banyuwangi yang mengacu pada pendapat di atas dapat dilihat melalui

nilai rata-rata hasil Ujian Akhir Sekolah (UAS) yang dapat dilihat dalam tabel 7. berikut ini:

Tabel 7. Nilai rata-rata ujian akhir sekolah SD di Kabupaten Banyuwangi

NILAI RATA – RATA PER – MATA PELAJARAN							Tahun ajaran
BHS.IND	PPkn	IPS	IPA	MTK	JML	RATA-RATA	
5.96	6.3	7.31	6.1	5.57	31.24	6.24	2006 - 2007
6.24	7.71	5.68	6.45	6.01	32.09	6.41	2005 - 2006
7.02	6.95	6.16	5.87	6.45	32.45	6.49	2004 - 2005

Sumber : SUBDIN Pengumpulan dan Pengolahan data Kabupaten Banyuwangi

Dengan melihat tabel 7 diatas, di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2004/2005 Nilai Rata-rata permata pelajaran yang ada 6,49%, kemudian pada tahun 2005/2006 turun menjadi 6,41% dan kemudian pada tahun 2006/2007 Nilai Rata-rata kembali turun menjadi 6,24%.

b. Tingkat Kelulusan Ujian Akhir Sekolah Dasar

Setiap siswa yang mengikuti ujian selalu mempunyai keinginan yang sama yaitu bisa lulus ujian. Namun sebenarnya lulus saja belum cukup untuk menjamin bahwa seorang siswa tersebut adalah siswa yang unggul dan berprestasi, karena disamping bisa lulus ujian mereka juga harus bisa meraih nilai yang memuaskan. Namun dalam kenyataanya yang ada di kalangan siswa sendiri, mereka tidak begitu peduli dengan nilai yang didapatnya asalkan mereka bisa mencapai kelulusan. Dalam tabel 8. berikut ini ditunjukkan tingkat kelulusan siswa SD yang mengikuti UAS:

Tabel 8. Tingkat kelulusan ujian akhir sekolah SD di Kabupaten Banyuwangi per 2004/2005, 2005/ 2006, 2006/ 2007

TAHUN PELAJARAN	JUMLAH PESERTA	LULUS	%	TIDAK LULUS	%
2004 - 2005	21536	21476	99,73	60	0.27
2005 - 2006	26416	26354	99,76	62	0.24
2006 - 2007	26222	26151	99,72	51	0.28

Sumber : SUBDIN Pengumpulan dan Pengolahan data Kabupaten Banyuwangi

Dengan melihat tabel 8. diatas prosentase kelulusan pada Tahun Ajaran 2004/2005 adalah 99,73%, dan pada tahun 2005/2006 angka prosentase kelulusan naik menjadi 99,76%, dan kemudian pada tahun 2006/2007 angka prosentase kelulusan Ujian Akhir Sekolah turun kembali menjadi 99,72%.

Hal senada seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Dra Ahmad Khoirullah, M.M, selaku Kasie Kurikulum TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi bahwa: “memang bebarapa tahun terakhir ini prestasi siswa di kabupaten Banyuwangi cenderung menurun walaupun tidak disemua kecamatan yang ada pada kabupaten Banyuwangi oleh karena itu kami akan lebih meningkatkan pembinaan guru dan pembinaan siswa-siswanya untuk lebih banyak belajar dan berusaha lebih baik”. (Wawancara tanggal 9 November 2007 pukul 10.00 WIB).

3. Faktor Penghambat dan Pendukung.

a. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya guru SD di kabupaten Banyuwangi ini seperti pada umumnya pada kegiatan-kegiatan yang lain tidak lepas dari adanya berbagai kendala. Meskipun kendala tersebut merupakan kendala yang kecil akan tetapi hendaknya diperhatikan dan dicari alternatif pemecahannya dengan meningkatkan kegiatan tersebut serta optimalisasi hasil yang akan dicapai, yaitu manusia-manusia yang berkualitas dan siap dengan tantangan masa depan.

Adapun faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini antara lain dari segi:

- Sumber daya manusia dilihat dari segi pendidikannya sudah bagus, tetapi pada kualitas pribadi yang melekat pada diri seseorang seperti tercermin pada produktifitas, disiplin kerja masih kurang bagus. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Ibu Dra. Hj.Suhermik,MPd selaku Kepala Sekolah SDN 4 Penganjuran “faktor penghambat yang berasal dari guru saat pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia yaitu bahwa kebanyakan para guru ada yang berperan ganda dalam suatu organisasi dan kurang memperhatikan tugasnya sebagai guru karena ada tugas lain selain sebagai guru”
- Pendanaan, sudah menjadi fenomena umum dalam melaksanakan suatu kegiatan hambatan ini selalu ada. Hal ini sesuai dengan dengan pernyataan Bapak Ahmad Khoirullah selaku kasie kurikulum TK/SD. “Sebagai contoh adalah dana dari pemerintah yang disebut *block grants* untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan di gugus secara praktis masih belum mencukupi. Untuk mengatasi masalah ini Dinas Pendidikan Kabupaten

Banyuwangi menempuh jalan alternatif mengadakan iuran setiap bulan (swadaya guru) tetapi itupun biasanya kegiatan tersebut tidak bisa rutin dilaksanakan” (Wawancara tgl 8 November pukul 09.45 WIB).

- Lokasi (Tempat pelaksanaan) jarak dari SD-SD yang ada menuju ke lokasi pelaksanaan relatif jauh, sehingga kebanyakan dari guru tidak menghadiri kegiatan tersebut.
- Waktu pelaksanaan, para guru juga mempunyai kesibukan masing-masing sehingga kadang terbentur dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Ibu Dra.Hj.Suhernik,Mpd selaku Kepala Sekolah SDN 4 Penganjuran sebagai berikut: “Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan kualitas sumber daya guru yaitu bahwa seringkali para guru mempunyai kegiatan yang lain pada waktu yang sama sehingga pada saat acara dimulai ada guru yang tidak datang atau walaupun ada yang datang itupun terlambat sehingga menghambat jalannya kegiatan karena seringkali pembahas mengulang hal-hal yang sudah dibicarakan”.(Wawancara tgl 10 November 2007 pukul 10.00 WIB)
- Sarana dan Prasarana, keterbatasan sarana dan prasarana pada dasarnya berkaitan erat dengan keterbatasan dana, tanpa adanya dana yang cukup sarana dan prasarana penunjang kegiatan itupun tidak mungkin terpenuhi.

Bila dilihat dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa dalam kegiatan ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala tersebut dapat menimbulkan masalah yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu sebaiknya para guru dan pembina dalam kegiatan tersebut harus dengan penuh kesungguhan mencari cara terbaik untuk memecahkan masalah-masalah atau kendala tersebut.

b. Faktor pendukung

Di samping adanya faktor penghambat atau kendala yang dihadapi oleh pihak dinas pendidikan Kabupaten Banyuwangi, pihak peninjau dalam hal ini Pengawas Sekolah, para guru dan pembina dalam kegiatan tersebut, maka terdapat pula faktor-faktor pendukung yang menunjang berlangsungnya kegiatan ini. Adapun faktor-faktor pendukung tersebut antara lain adalah motivasi dan dorongan yang diberikan oleh para pengawas sekolah dan juga dari pihak kepala sekolah bahwa mereka mempunyai minat serta kesadaran dan kesungguhan dalam mengikuti kegiatan tersebut agar kualitas gurunya meningkat pula.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Ibu Dra.Hj.Suhermik,MPd selaku kepala sekolah SDN 4 Penganjuran.“Pelaksanaan pengembangan sumber daya guru SD penyelenggaraannya banyak didukung dan dimotivasi oleh kehadiran pengawas dan kepala sekolah. Disini kepala sekolah sebagai ketua pelaksanaan kegiatan, dan juga adanya sarana dan prasarana, kebersamaan antae SD inti dan SD imbas serta kesadaran para guru akan pentingnya kegiatan ini. (Wawancara pada hari sabtu 10 November pukul 10.30 WIB di ruang Kepala Sekolah).”

Faktor-faktor pendukung yang dapat diketahui dari hasil wawancara dan pengamatan diatas seharusnya dapat dipertahankan bahkan dikembangkan dengan baik supaya kegiatan pengembang sumber daya guru SD ini bisa dilaksanakan secara optimal.

C. Analisa Data Fokus.

Dalam sub bab ini disajikan hasil analisa data fokus yang akan didapatkan suatu gambaran mengenai pengembangan sumber daya guru SD di Kabupaten Banyuwangi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

1. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Guru SD di Kabupaten Banyuwangi.

a. Kegiatan yang dilakukan secara teratur dalam Gugus Sekolah.

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi merupakan unsur pelaksana daerah yang memiliki tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendidikan. Oleh karena itu sewajarnya bila diselenggarakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu pengembangan sumber daya guru SD yang dilaksanakan secara teratur melalui sistem gugus sekolah. Sistem gugus SD di Kabupaten Banyuwangi sudah memenuhi syarat yang ada, karena masing-masing gugus terdiri dari 3 s/d 8 SD yang mana dalam gugus tersebut letak SD yang satu dengan SD yang lain saling berdekatan, sehingga memudahkan dalam berkomunikasi dan bekerja sama dalam mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan.

Adapun kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam setiap gugus SD di Kabupaten Banyuwangi adalah:

1. Pembentukan SD Inti Dan SD Imbas.

Sesuai dengan apa yang dikemukakan pada bab II dalam setiap gugus SD di Kabupaten Banyuwangi juga terdiri dari 1 SD inti dan beberapa SD imbas. SD inti tersebut merupakan pusat bagi suatu gugus SD yang merupakan tempat diadakannya atau berlangsungnya kegiatan-kegiatan dalam gugus tersebut, sedangkan beberapa SD imbas yang ada merupakan anggota gugus. Dalam setiap kegiatan yang diadakan gugus, para guru dari SD imbas berkumpul di SD inti untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan tentang keberadaan SD inti di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat bahwa SD inti yang telah ditunjuk, merupakan SD paling lengkap sarana dan prasarana dibanding dengan SD yang lain sesama anggota gugus. Dalam suatu gugus, SD inti memiliki peralatan-peralatan dan fasilitas paling lengkap dibanding SD yang lain untuk kelancaran kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di SD itu. Seperti halnya yang disebutkan dalam contoh penyajian data, dalam kecamatan Banyuwangi terdapat SD inti dan SD imbas.

2. Kelompok Kerja Guru

Dalam setiap gugus SD di Kabupaten Banyuwangi diadakan KKG yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin dengan jangka waktu seminggu sekali, setiap Sabtu. Namun bila dibutuhkan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan melebihi dari jadwal yang telah ditentukan. Tetapi dalam masa-masa sibuk seperti pada waktu mendekati ujian sekolah, maka kegiatan KKG tersebut ditiadakan karena waktu yang ada digunakan untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan ujian tersebut. Dalam kegiatan KKG para guru SD di Kabupaten Banyuwangi saling bertukar pikiran, berdiskusi dan mencari solusi bersama tentang masalah-masalah ataupun kesulitan-kesulitan yang dihadapi para guru tersebut. Tentang seputar kegiatan belajar mengajar di sekolah. Selain itu, melalui KKG para guru mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh dinas pendidikan pada tingkat Kabupaten, Propinsi, maupun tingkat Nasional dapat menularkan pengetahuan yang didapatkannya dari hasil kegiatan yang diikutinya tersebut kepada para guru yang lain dalam satu gugus. Dan guru yang menularkan hasil kegiatan yang diikutinya tersebut berlaku sebagai Pengampu dalam KKG.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam KKG di Kabupaten Banyuwangi secara umum:

1. Menyusun program tahunan Gugus 6 Th. 2005/2006 sesuai visi misi masing-masing.
2. Pertemuan rutin KKKS membahas permasalahan PBM Guru Kelas
3. Menyelenggarakan seleksi guru, siswa teladan dan lomba mata pelajaran
4. Membahas kelengkapan administrasi sekolah dan administrasi pembelajaran (MBE->PAKEM->KBK).
5. Memantau dan pembinaan pelaksanaan KKG dalam menindak lanjuti pembaharuan pendidikan (KBK).
6. Membahas pembiayaan kegiatan Gugus 6 termasuk KKKS dan KKG Gugus 6.
7. Membahas pelaksanaan UUB dan UAS dan teknik pengadaan instrumen sesuai kebijaksanaan Diknas.
8. Mengadakan kegiatan supervisi kelas satu atau pembinaa profesi dan territorial.
9. Membahas penyatuan persepsi penerimaan murid baru Th.20005/2006
10. Meningkatkan upaya pengembangan kemajuan sekolah lewat berbagai kegiatan bermutu.
11. Membahas upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan.
12. Membina peningkatan kesejahteraan Guru dan karyawan sekolah

Dalam ketentuan yang ada, apabila para guru dalam kegiatan belajar mengajar mendapat suatu masalah yang tidak dapat dipecahkan melalui KKG, maka masalah itu akan dibawa kemudian dibahas oleh Kepala Sekolah dalam Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS). Namun bila dalam KKKS masalah tersebut belum juga terpecahkan, maka masalah itu dapat dibahas oleh para pengawas sekolah dalam Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), dan bila dalam KKPS masalah tersebut belum bisa terpecahkan, maka masalah tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan oleh pihak dinas akan diselenggarakan seminar mengenai masalah tersebut. Sedangkan sesuai dengan

keterangan yang ada sejauh ini KKG di Kabupaten Banyuwangi dapat menyelesaikan masalah-masalah seputar belajar mengajar dalam bidang studi yang mereka hadapi dengan baik dan tidak melibatkan pihak lain dalam mencari solusi untuk memecahkan masalah yang ada.

Kegiatan KKG yang merupakan sarana yang paling efektif dalam mengembangkan sumber daya guru SD ini menjadi prioritas utama bagi dinas pendidikan Kabupaten Banyuwangi untuk membina para guru SD tersebut dengan menugaskan para pengawas sekolah untuk mengontrol kegiatan tersebut.

3. Pusat Kegiatan Guru (PKG)

Pusat Kegiatan Guru (PKG) adalah tempat KKG dan KKKS mengadakan kegiatan bersama yaitu rapat dan diskusi. Wadah ini merupakan bengkel kerja dan pusat belajar, tempat guru saling berbagi kemampuan dan pengalaman, berdiskusi bersama mengenai masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran di sekolah. PKG bertempat di SD inti yang pengelolaannya dilakukan bersama oleh sekolah yang menjadi anggota gugus.

PKG yang ada di Kabupaten Banyuwangi dikelola bersama oleh sekolah yang menjadi anggota gugus, seperti halnya yang dilakukan oleh gugus sekolah 06 kecamatan Banyuwangi yang penyelenggaraanya di SDN 4 Penganjuran dan cara kerjanya sudah dikelompokkan menurut masalah yang dibahas.

b. Kegiatan yang dilakukan secara temporer

Kegiatan pengembangan sumber daya guru SD memang sangat efektif bila dilaksanakan secara rutin. Namun disamping itu, para guru SD tersebut juga membutuhkan pendalaman tentang pengetahuan yang dimilikinya. Oleh karena itu Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mengadakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara temporer bagi guru supaya bisa lebih mendalami pengetahuan yang dimilikinya. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

1. Pendidikan dan Latihan (DIKLAT)

Kegiatan diklat yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi diperuntukkan bagi beberapa guru SD di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Jadi peserta diklat tersebut bukan seluruh guru yang ada,

namun hanya beberapa guru saja yang ditunjuk untuk mewakili guru-guru yang lain dari seluruh kecamatan yang tersebar di kabupaten Banyuwangi. Para peserta diklat tersebut nantinya mempunyai tugas untuk menularkan pengetahuan yang didapatkannya dari hasil diklat yang diikutinya kepada guru yang lain melalui KKG sehingga para guru yang tidak mengikuti diklat dapat mengetahui juga tentang apa yang dibahas dari diklat tersebut. Pelaksanaan diklat ini biasanya diselenggarakan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi pada tingkat kabupaten, propinsi maupun pada tingkat pusat.

Diklat yang diadakan di Kabupaten Banyuwangi tentang peningkatan Mutu Pendidikan dan Non Kependidikan untuk jenjang SD pada tahun 2006 diikuti oleh guru-guru SD yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Adapun materi yang dibahas yaitu pelatihan dan pembelajaran Pakem, hal tersebut sudah termasuk lengkap karena mencakup berbagai hal penting dalam peningkatan mutu tenaga kependidikan dan non kependidikan yaitu pengelolaan sekolah dan pendalaman materi bidang studi.

2. Penataran

Seperti halnya diklat, penataran biasanya juga dilaksanakan pada tingkat kabupaten, propinsi maupun tingkat pusat. Sedangkan pada tingkat kecamatan tidak pernah menyelenggarakan penataran karena pihak cabang dinas pendidikan belum mampu memprakarsainya.

Peserta penataran sama halnya dengan peserta diklat yaitu tidak semua guru di kabupaten Banyuwangi diberi kesempatan untuk mengikuti penataran, karena ditunjukan hanya beberapa SD yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, sehingga mereka mewakili para guru SD yang lain.

Adapun para guru SD yang menjadi peserta penataran juga memiliki tugas untuk menularkan atau mengimbaskan pengetahuan dari hasil penataran yang diikutinya kepada guru-guru SD yang lainnya dalam satu gugus melalui wadah dan sarana untuk mempercepat arus pembaharuan pendidikan dalam KKG.

Hal yang dibahas atau dijadikan dalam penataran biasanya mengenai bidang studi yang diajarkan di SD. Oleh karena itu, yang mengikuti penataran tentang bidang studi tertentu adalah guru SD yang mengajar tentang bidang studi yang dibahas dalam penataran tersebut. Adapun selama bulan Oktober s/d November

2006 di Kabupaten Banyuwangi telah diadakan tiga jenis penataran yaitu penataran tentang bidang studi IPA, IPS, dan Matematika. Dengan demikian dapat dilihat bahwa dalam jangka waktu itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi menilai bahwa penataran yang diperlukan guru SD pada saat itu adalah bidang studi IPA, IPS, Matematika.

3. Seminar

Kegiatan seminar untuk guru SD yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi hampir sama sistemnya dengan kegiatan Diklat dan Penataran, karena seminar hanya diselenggarakan oleh pihak Dinas Pendidikan pada tingkat kabupaten, propinsi, maupun di tingkat pusat.

Dalam memberikan kesempatan bagi guru SD untuk mengikuti seminar sistemnya pun sama dengan kegiatan diklat dan penataran, yaitu ditunjuk dari beberapa SD yang ada di setiap kecamatan untuk mewakili guru-guru yang lain.

Adapun materi yang dibahas dalam seminar biasanya merupakan hal-hal yang baru, yaitu hal-hal yang diperkirakan nantinya akan bisa memajukan mutu pendidikan. Dalam seminar yang ada akan disajikan penjelasan dan keterangan secara jelas. Setelah itu diadakan tanya jawab atau diskusi yang nantinya diharapkan dapat memperoleh kesatuan persepsi yang berguna untuk pengambilan langkah selanjutnya secara pasti.

2. Peningkatan kualitas pendidikan yang dicapai di Kabupaten Banyuwangi

Untuk mengetahui tentang peningkatan kualitas pendidikan yang dicapai di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat atau diukur melalui:

a. Nilai Rata-rata Ujian Akhir Sekolah (UAS)

Nilai rata-rata yang diperoleh siswa dalam UAS merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui peningkatan kualitas pendidikan. Adapun nilai rata-rata UAS siswa SD di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 mengalami ketidakstabilan yaitu nilai tersebut yaitu pada tahun 2004/2005 Nilai Rata-rata permata pelajaran yang ada 6,49%, kemudian pada tahun 2005/2006 turun menjadi 6,41% dan kemudian pada tahun 2006/2007 Nilai Rata-rata kembali turun menjadi 6,24%. Hal itu berarti terjadinya

ketidakstabilan kualitas dunia pendidikan di Kabupaten Banyuwangi, karena itu perlunya perhatian yang lebih supaya kualitas pendidikan di Kabupaten Banyuwangi lebih meningkat.

b. Tingkat kelulusan UAS

prosentase kelulusan pada Tahun Ajaran 2004/2005 adalah 99,73%, dan pada tahun 2005/2006 angka prosentase kelulusan naik menjadi 99,76%, dan kemudian pada tahun 2006/2007 angka prosentase kelulusan Ujian Akhir Sekolah turun kembali menjadi 99,72%, padahal salah satu syarat untuk bisa menamatkan sekolah pada jenjang SD dan melanjutkan ke jenjang SLTP harus mengikuti UAS dengan predikat lulus.

Kelulusan UAS ini menjadi prioritas utama bagi siswa meskipun nilai yang mereka peroleh masih sangat kurang, namun yang penting bagi mereka adalah dapat melewati ujian dengan predikat lulus, sehingga meskipun nilai mereka rendah tapi mereka dapat melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya. Oleh karena itu para siswa di Kabupaten Banyuwangi cenderung tidak terlalu memperdulikan nilai yang mereka peroleh yang penting bisa lulus.

Para siswa SD yang mengikuti UAS tersebut harus mencapai standart kelulusan UAS yang berlaku saat itu, yaitu 3,01 untuk bisa luluskan ujiannya. Dan bagi siswa yang belum bisa mencapai nilai yang distandarkan, mereka diberi kelonggaran atau kesempatan untuk mencoba sekali lagi yaitu mereka bisa mengikuti ujian ulang. Namun bila dalam ujian ulang tersebut mereka tidak lulus juga, maka mereka harus tinggal kelas.

Dengan melihat turunnya prosentase tingkat kelulusan UAS dalam tiga tahun ini, dapat dilihat bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Banyuwangi masih kurang bahkan dalam kurun waktu tiga tahun tersebut kualitas pendidikan kian menurun.

3. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung

a. Faktor Penghambat

Dalam kegiatan pengembangan sumber daya guru SD di Kabupaten Banyuwangi terdapat faktor-faktor penghambat yang menjadi kendala dalam kegiatan tersebut.

Faktor-faktor penghambat tersebut adalah:

1. Sumber daya manusia dilihat dari segi pendidikannya sudah bagus, tetapi pada kualitas pribadi yang melekat pada diri seseorang, kualitas kelayakan seperti tercermin pada produktifitas, disiplin kerja masih kurang bagus.
2. Dana yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan dalam pengembangan sumber daya guru SD masih sangat kurang sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya kegiatan yang dilakukan.
3. Lokasi SD-SD dalam satu gugus di Kabupaten Banyuwangi yang seharusnya saling berdekatan, namun ada SD yang letaknya jauh dari SD yang lain.
4. Terdapat kesulitan dalam penyatuan waktu untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara rutin, karena masing-masing guru mempunyai keperluan yang berbeda-beda, sehingga tidak semua guru dapat mengikuti kegiatan itu.
5. Sarana dan prasarana yang menunjang dalam kegiatan tersebut masih banyak yang belum dimiliki.

Kendala-kendala tersebut diatas mengakibatkan kurang efisiennya hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh karena itu semua pihak baik Dinas Pendidikan, Guru, Kepala Sekolah, maupun Pengawas Sekolah harus dengan sungguh-sungguh mencari alternatif untuk memecahkan kendala-kendala yang ada.

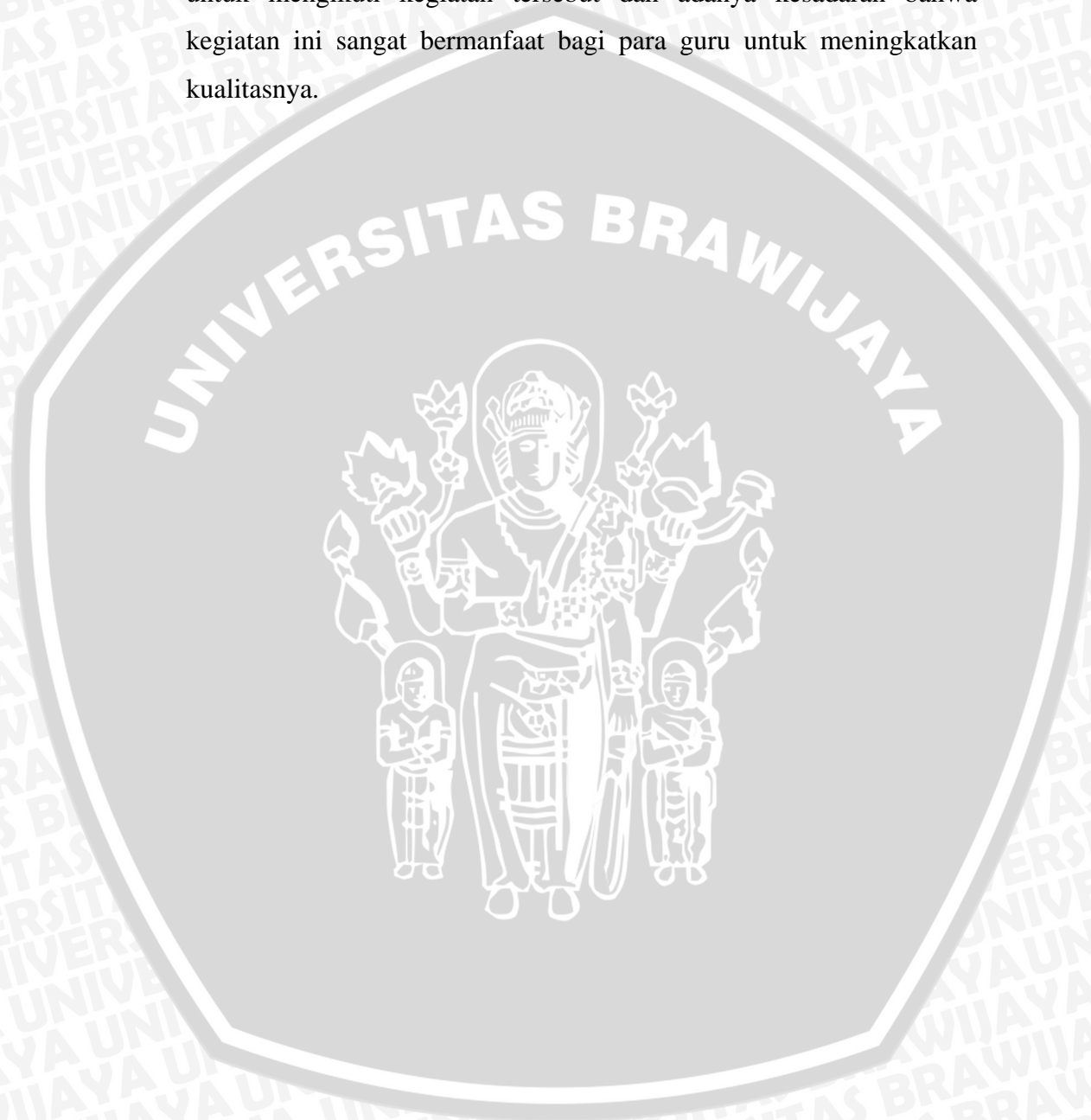
b. Faktor Pendukung

Kemudian disamping terdapat faktor penghambat pendukung yang sangat berpengaruh dalam kegiatan ini. Faktor pendukung tersebut adalah :

1. Para pengampu, pengawas sekolah dan juga pihak Dinas Pendidikan Banyuwangi memberi motivasi atau dorongan dan juga menyakinkan

para guru bahwa kegiatan tersebut sangat berguna untuk menunjang kelancaran kegiatan belajar mengajar dan menambah pengetahuan mereka.

2. Adanya minat dan semangat yang besar dari para Kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan tersebut dan adanya kesadaran bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para guru untuk meningkatkan kualitasnya.





BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada uraian sebelumnya, yaitu pembahasan mengenai pengembangan sumber daya guru SD dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara teratur dan temporer, kemudian peningkatan kualitas pendidikan yang dapat diukur melalui nilai rata-rata dan tingkat kelulusan UAS, serta faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam kegiatan yang dilaksanakan tersebut, setelah dilakukan penelitian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dan lembaga SD di Kabupaten Banyuwangi telah diperoleh suatu kesimpulan :

1. Bahwa kegiatan pengembangan sumber daya guru SD di Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan secara teratur melalui gugus sekolah yang meliputi SD Inti dan SD Imbas, Kelompok Kerja Guru (KKG), Pusat kegiatan Guru (PKG) dan secara temporer melalui Diklat, Penataran dan Seminar. Kegiatan tersebut telah diselenggarakan oleh Dinas pendidikan Kabupaten Banyuwangi dan dilaksanakan dengan baik oleh para guru di kabupaten Banyuwangi, meskipun masih terdapat berbagai kendala yang menghambat kegiatan tersebut.
2. Peningkatan kualitas pendidikan yang dicapai di Kabupaten Banyuwangi diukur melalui nilai rata-rata UAS siswa SD dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 yang telah mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Sedangkan tingkat kelulusan UAS dalam kurun waktu 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di kabupaten Banyuwangi cenderung kian menurun dalam kurun waktu tiga tahun untuk nilai rata-rata UAS dan tiga tahun mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya untuk tingkat kelulusan UAS.
3. Dalam kegiatan pengembangan sumber daya guru SD ini terdapat faktor penghambat, yaitu dana yang tersedia masing kurang, lokasi SD

ada yang sulit dijangkau, terdapat kesulitan dalam penyatuan waktu untuk pelaksanaan kegiatan, serta masih banyaknya saran dan prasarana yang belum dimiliki untuk menunjang kegiatan tersebut. Faktor-faktor penghambat ini perlu untuk dicari solusi supaya tidak berlarut-larut menjadi kendala dalam kegiatan ini. Sedangkan faktor pendukungnya adalah motivasi atau dorongan yang diberikan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dan para pengawas sekolah serta adanya minat dan semangat yang besar dari para guru dan Kepala Sekolah untuk mengikuti kegiatan pengembangan tersebut.

B. SARAN

Saran-saran yang hendak dikemukakan berdasarkan uraian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sebaiknya memperbanyak kegiatan pengembangan sumber daya guru SD yang diprogram, dilaksanakan dan diperuntukkan bagi para guru SD dan juga menambah anggaran dana untuk kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya guru SD agar bisa lebih sering dan rutin dilaksanakan.
2. Kegiatan pengembangan sumber daya guru SD seharusnya diikuti pula dengan peningkatan kualitas dan kuantitas dari sarana dan prasarana yang menunjang, diantaranya penambahan fasilitas komputer, ruangan yang khusus disediakan untuk kegiatan "*in house training*", laboratorium dan sebagainya.
3. Untuk para guru SD di Kabupaten Banyuwangi, sangat diharapkan kerja samanya dalam kegiatan pengembangan sumber daya guru SD demi kelancaran kegiatan yang dilakukan. Para guru tersebut diharapkan mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada serta dengan rela hati dan sungguh-sungguh melaksanakan kegiatan pengembangan ini demi tercapainya peningkatan kualitas pendidikan.
4. Sebaiknya para guru dan pembina dalam kegiatan pengembangan sumber daya guru SD harus dengan penuh kesungguhan mencari cara terbaik untuk memecahkan masalah dan kendala yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Depdikbud. 1996. *Petunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di SD*. Jakarta : Dirjen Dikdas dan Menum, Direktorat Dikdas, Depdikbud.
- Depdiknas. 2002. *Manajemen Peningkatan Berbasis Sekolah. Konsep Dasar* (Buku 1). Jakarta : Depdiknas.
- Effendi, Tajuddinur Nur. 1995. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Ekowati, Lilik, Mas Roro, M.S. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*. Suakarta: Pustaka Cakra.
- FIA. 2005. *Pedoman Penyusunan Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi*. Malang : FIA Unibraw.
- Hakim, Abdul. 1995. *Sumber Daya Manusia, Masalah, Pendekatan dan Pengembangan dalam Manajemen SDM Masalah, Tantangan dan Strategi Pengembangan*. Malang : IKIP.
- Hasibuan, Malayu. 1990. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Liang Gie, The. 1998. *Pendidikan Ilmu Di Negara Indonesia*. Yogyakarta: PUBIB.
- Martoyo, Susilo. 1987. *Manajemem Sumber Daya Manusia*. Yogjakarta : BPFE. UGM.
- Moekijat. 1991. *Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung CV. Alumni.
- Moenir, Anas. 1983. *Pendekatan Manusiawi dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepergawain*. Jakarta : Gunung Agung.
- Moleong, Lexy J,1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosda Karya.
- Muluk, khairul. 2005. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang : Bayumedia Publishing.

Nawawi, Hadawi. 1995. *Instrument Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Siagian, SP. 1995. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sahertian, Piet A dan Sahertian, Ida Aleida. 1990. *Supervisi 2000. Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.

Supriadi, Dedi. 2003. *Guru di Indonesia*. Jakarta : Depdiknas RI Dirjen Dikdasmen Dirjen Tenaga Kependidikan

Tilaar, H. A. R. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

